



**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 14 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019-2039**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
INDUSTRI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN  
2019-2039.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Industri Unggulan adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh Provinsi, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang dilokasi tertentu.
7. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
8. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

9. Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan dan pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2039.
10. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di kabupaten/kota.
11. Program Pembangunan Industri Provinsi adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di provinsi atau kabupaten/kota.

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam perencanaan dan pembangunan industri;
- b. pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi dalam menyusun RPIK; dan
- c. pedoman bagi pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun Industri Provinsi.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan pelaku Industri dalam pembangunan Industri di Provinsi;
- b. pedoman dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang RPIK; dan
- c. acuan Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugasnya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Provinsi;
- b. Jangka Waktu dan Pelaksanaan;
- c. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; dan
- d. Pendanaan.

## BAB II INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI

### Pasal 5

- (1) Industri unggulan Provinsi dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Provinsi meliputi:
  - a. industri pengolahan perikanan;
  - b. industri pengolahan lada;
  - c. industri pengolahan sawit; dan
  - d. industri pengolahan timah dan mineral ikutan timah (hilirisasi timah).
- (2) Selain Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Provinsi dapat dikembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan unggulan kabupaten/kota di Provinsi.

### Pasal 6

- (1) Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi dalam menyusun RPIK mengacu pada RPIP.
- (2) Pengembangan Industri kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

## BAB III JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN

### Pasal 7

- (1) RPIP ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu 2019-2039.
- (2) RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Sistematika RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
  - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
  - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH; DAN
  - e. BAB V : PENUTUP.
- (4) RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 8

RPIP sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Provinsi.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi mendorong kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Provinsi skala besar.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.

Pasal 12

- (1) Gubernur menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIP kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan bidang perindustrian secara berkala setiap tahun.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat pertumbuhan sektor Industri, kontribusi Industri nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto, nilai ekspor produk Industri, jumlah tenaga kerja di sektor Industri, nilai investasi sektor Industri dan pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan industri yang meliputi sumber daya Industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan Industri.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan RPIP dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

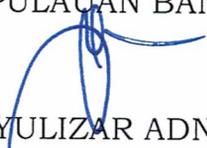
Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 31 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
YULIZAR ADNAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019  
NOMOR 10 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: (14 - 431 / 2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Bangka Belitung memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor pertanian, pertambangan, maupun perikanan, diantaranya yang menonjol adalah lada, hasil laut, sawit, dan timah beserta mineral ikutannya. Sesuai dengan potensi sumber daya alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah *industri pengolahan lada, industri pengolahan hasil laut dan perikanan, industri pengolahan timah (hilirisasi timah), mineral ikutan timah dan mineral tanah jarang, dan industri pengolahan sawit*, yang merupakan komoditi utama daerah.

Dalam rangka memperkuat dan memperjelas peran pemerintah daerah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri provinsi yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039.

Penyusunan RPIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIP 2019-2039 disusun dengan memperhatikan: potensi sumber daya industri daerah; Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan RPIP 2019-2039 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- a. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- c. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
- d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

- f. mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruhan wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan
- g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Industri lain yang potensial dan merupakan unggulan kabupaten/kota seperti komoditas tertentu dari sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, industri kreatif, industri berbasis IT, berbasis seni dan budaya, dan sebagainya dapat didorong dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 89

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019-2039

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2019-2039**

# DAFTAR ISI

<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	2
1.2. DASAR HUKUM.....	3
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN .....	3
<b>2. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI .....</b>	<b>6</b>
2.1. KONDISI DAERAH.....	6
2.1.1. Geografi.....	6
2.1.2. Demografi.....	7
2.1.3. Infrastruktur.....	8
2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi.....	10
2.2. SUMBER DAYA INDUSTRI.....	15
2.3. SARANA PRASARANA .....	17
2.3.1. Pengelolaan Lingkungan .....	17
2.3.2. Lahan Industri berupa Kawasan Industri dan atau Kawasan Peruntukan Industri.....	17
2.3.3. Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan.....	18
2.3.4. Fasilitas Jaringan Telekomunikasi.....	19
2.3.5. Fasilitas Jaringan Sumber daya Air.....	20
2.3.6. Fasilitas Sanitasi .....	20
2.3.7. Fasilitas Jaringan Transportasi dan Infrastruktur Penunjang, Lembaga Uji, Kawasan Berikat, Kawasan Pergudangan.....	21
2.4. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.....	23
2.4.1. Sentra Industri Kecil Menengah.....	23
2.4.2. Unit Pelayanan Teknis, Tenaga Penyuluh Lapangan, Konsultan Industri Kecil Menengah.....	24
<b>3. VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.....</b>	<b>25</b>
3.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI .....	25
3.2. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG .....	25
3.3. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.....	25
3.4. STRATEGI PENCAPAIAN DAN ARAH KEBIJAKAN.....	26
<b>4. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI.....</b>	<b>27</b>
4.1. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI .....	27
4.2. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI.....	29
4.2.1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi.....	29
4.2.2. Pembangunan Perwilayahan Industri.....	59
4.2.3. Pembangunan Sumber Daya Industri.....	63
4.2.4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri .....	67
4.2.5. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).....	71
<b>5. PENUTUP .....</b>	<b>74</b>

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang relatif baru di wilayah Sumatera yang merupakan hasil pemekaran wilayah dari Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi yang terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil seperti Pulau Lepar, Pulau Pongkok, Pulau Mendanau dan Pulau Selat Nasik. Total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Total luas provinsi Bangka Belitung 18.725,14 km<sup>2</sup> dengan 79,99 persen terdiri dari wilayah perairan, dengan populasi penduduk pada tahun 2015 mencapai 1.368.978 jiwa dan tingkat kepadatan 73,10 jiwa/km<sup>2</sup>.

Meski pada dasarnya Indonesia adalah negara agraris dan maritim, namun proses industrialisasi dianggap sangat penting untuk mengejar ketertinggalan ekonomi dari negara-negara lain. Industrialisasi dianggap sebagai bagian dari proses modernisasi dimana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Peningkatan produktivitas pertanian dan kelautan memang terus dilakukan, namun sampai saat ini belum memiliki nilai tambah tinggi karena keterbatasan teknologi *processing* yang menjadi kebutuhan pasar. Teknologi *processing* guna mempertinggi nilai tambah hasil produksi pertanian dan kelautan bisa dilakukan melalui industri pengolahan.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Sebagai daerah berbasis agraris dan maritim, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menyiapkan strategi industrialisasi berbasis pertanian dan kelautan. Penciptaan nilai tambah pada produk pertanian dan kelautan bukan saja akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi juga lebih bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pemerintah berkepentingan untuk memacu wilayah kawasan industri di Pulau Sumatera sebagai bagian dari upaya melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi, sehingga proses industrialisasi tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, pemerintah telah menyusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2015. Selanjutnya RIPIN menjadi acuan bagi setiap Provinsi dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) sebagaimana Pasal 4 huruf b.

Sektor industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi wilayah. Dalam hal ini, industrialisasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing wilayah. Industrialisasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, yang diharapkan dapat menciptakan pendapatan perkapita yang tinggi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka provinsi perlu membuat rencana dan program yang strategis dalam RPIP.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan

Kebijakan Industri Nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh". Tiga hal penting yang diperhatikan dalam penyusunan strategi industrialisasi di Kepulauan Bangka Belitung adalah: 1) optimasi industri eksisting, 2) Pengembangan industri baru dan 3) Pengembangan perwilayahan industri. Di dalam RIPIN wilayah Indonesia dibagi ke dalam sepuluh Wilayah Pengembangan Industri (WPI), dimana Kepulauan Bangka Belitung masuk dalam Wilayah Pengembangan Industri Sumatera bagian selatan bersama Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Lampung.

Penyusunan RPIP 2019-2039 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu: 1. mewujudkan industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pilar dan penggerak perekonomian wilayah; 2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri; 3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; 4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; 5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; 6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah provinsi Bangka Belitung guna memperkuat dan memperkuat ketahanan wilayah; dan 7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara berkeadilan.

## **1.2. DASAR HUKUM**

Dasar hukum dari pembuatan RPIP ini adalah:

1. Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 10 ayat (1) setiap gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi, atau Pasal 11 ayat (1) setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (1).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035.

## **1.3. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika RPIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 – 2039 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagai berikut:

### **I. Pendahuluan**

#### **1.1. Latar Belakang**

Menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utamapembangunan industri dan pentingnya rencana pembangunan industri provinsi.

#### **1.2. Dasar Hukum**

Menguraikan dasar hukum dalam penyusunan RPIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **1.3. Sistematika Penulisan**

Menguraikan sistematika dalam penyusunan RPIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **II. Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri**

#### **2.1. Kondisi Daerah**

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan bandar udara, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri.

## 2.2. Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang serta pembiayaan industri.

## 2.3. Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan.

## 2.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Menguraikan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM), Unit Pelayanan Teknis (UPT), jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

### **III. Visi Dan Misi Pembangunan Daerah, Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah**

#### 3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Uraian Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Bangka Belitung mengacu dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Provinsi Bangka Belitung tahun 2017 – 2022. RPIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan implementasi dari visi dan misi pembangunan daerah.

#### 3.2. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi

Menguraikan tujuan Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai penjabaran lebih lanjut, visi dan misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bidang industri.

#### 3.3. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi

Meliputi Pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri non migas terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Nilai ekspor produk industri, jumlah tenaga kerja di sektor industri, nilai Investasi sektor industri.

### **IV. Strategi dan Program Pembangunan Industri Provinsi**

#### 4.1. Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

#### 4.2. Program Pembangunan Industri

##### 1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi

Penentuan industri unggulan provinsi berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Provinsi.

##### 2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pogram-program yang terkait dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra IKM.

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, sanitasi, jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

5. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

**V. Penutup**

Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri propinsi selama dua puluh tahun ke depan.

## 2. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

### 2.1. KONDISI DAERAH

#### 2.1.1. Geografi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah kepulauan dengan letak geografi yang strategis karena lautan Bangka Belitung merupakan bagian jalur perdagangan internasional. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai provinsi ke-31 oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) No.27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan ([babelprov.go.id](http://babelprov.go.id), 2017).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan. Batas wilayah di sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka, sebelah Timur dengan Selat Karimata, sebelah Utara dengan Laut Natuna, dan sebelah Selatan dengan Laut Jawa. Total luas wilayah Provinsi adalah 81.725,14 km<sup>2</sup> dengan luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Luas laut kurang lebih 65.301 km<sup>2</sup> (79.90% dari total wilayah) dan luas daratan sekitar 16.424,23 km<sup>2</sup> (BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017)

Wilayah daratan merupakan gugusan Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, dan Tujuh. Sedangkan, Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya. perairannya merupakan bagian dangkalan Sunda dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai 2 (dua) jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu, perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka. Sebagian besar keadaan alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa dataran rendah dan lembah. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut (BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017).

Berdasarkan UU No. 5 tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003, wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota. Kabupaten dan kota tersebut berada di Pulau Bangka dan Belitung. Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kota Pangkalpinang terletak di Pulau Bangka. Sedangkan kabupaten yang berada di Pulau Belitung yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Ibukota provinsi terletak di Pangkalpinang yang berada di Pulau Bangka. Kabupaten Bangka Selatan merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terbesar (21,96% dari total luas wilayah) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tabel 1 menyajikan Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disertai dengan ibukota, luas, jumlah kecamatan, kelurahan dan desa di setiap kabupaten.

Tabel 1 Ibukota, Luas, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa berdasarkan Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

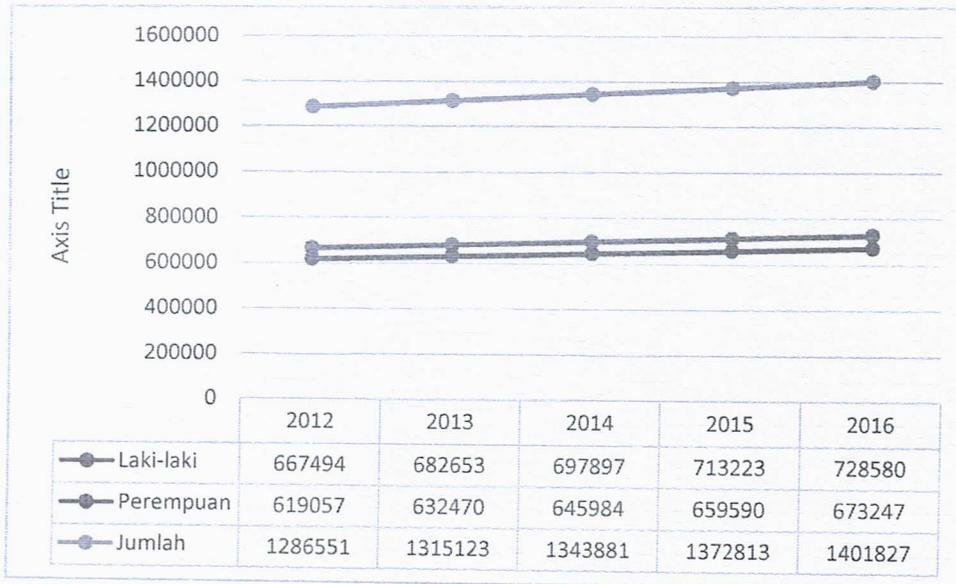
Kabupaten /Kota	Ibukota	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Kecamatan	Kelurahan	Desa
<b>Kabupaten</b>						
Bangka	Sungailiat	2.950,69	17,97	8	19	62
Bangka Barat	Muntok	2.820,61	17,17	6	4	60
Bangka Tengah	Koba	2.126,36	12,95	6	7	56

Bangka Selatan	Toboali	3.607,08	21,96	8	3	50
Belitung	Tanjungpandan	2.293,69	13,97	5	7	42
Belitung Timur	Manggar	2.507	15,26	7		39
<b>Kota</b>						
Pangkalpinang	Pangkalpinang	118,80	0,72	7	42	-
<b>Total</b>		16.424,23	100	47	82	309

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017)

### 2.1.2. Demografi

Bagian ini membahas dinamika kependudukan atau populasi manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilihat secara kuantitatif. Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil proyeksi penduduk pada tahun 2016 sebesar 1.401.827 orang. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata meningkat setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan 2016 sebesar 2,17%, dimana peningkatan laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi dari tahun 2012 ke 2013 (2.22%). Jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, yaitu perbedaannya rata-rata 51.900 orang selama periode tahun 2012-2016 (Gambar 1). Rasio jenis kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 108, dimana jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2016 sebanyak 728.580 orang dan penduduk perempuan sebanyak 673.247 orang.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017)

Gambar 1 Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Tingkat kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 86 orang per km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Pangkalpinang yaitu sebesar 1.687 orang per km<sup>2</sup>. Sedangkan Kabupaten Belitung Timur memiliki tingkat kepadatan terendah yaitu 49 orang per km<sup>2</sup>. Kota Pangkalpinang merupakan ibukota provinsi atau daerah perkotaan yang sudah memiliki infrastruktur memadai dan kesempatan kerja lebih banyak daripada daerah lainnya. Dengan demikian, kepadatan penduduk di Kota Pangkalpinang tertinggi di provinsi tersebut. Jumlah, laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk berdasarkan Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada

Tabel 2.

Tabel 2 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016.

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (orang)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2015-2016 (%)	Kepadatan penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )
	Laki-laki	Perempuan			
<b>Kabupaten</b>					
Bangka	165.529	152.206	317.735	2,14	108
Bangka Barat	104.689	95.995	200.684	2,08	72
Bangka Tengah	96.781	87.939	184.720	2,11	87
Bangka Selatan	102.654	95.016	197.670	2,11	55
Belitung	92.269	86.092	178.721	2,10	78
Belitung Timur	63.503	58.468	321.971	2,20	49
<b>Kota</b>					
Pangkalpinang	102.795	97.531	200.326	2,20	1.687
<b>Total</b>	<b>728.580</b>	<b>673.247</b>	<b>1.401.827</b>		

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017)

Jumlah penduduk Kepulauan Bangka Belitung usia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2016 sebanyak 999.760 orang (hasil Survei Angkatan Kerja Nasional [Sakernas], 2016). Sebesar 70,53% dari PUK termasuk dalam penduduk angkatan kerja (bekerja dan/atau mencari kerja) dan sisanya 29,47% adalah penduduk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, lainnya). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 sebesar 70,53% artinya 71% penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka yang sama (2,60) berarti dari 1.000 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 26 orang diantaranya merupakan pencari kerja. Tabel 3 menyajikan hal tersebut secara rinci berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 3 Aktifitas Penduduk Berusia di atas 15 tahun berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016.

Kegiatan utama	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
<b>Angkatan Kerja</b>			
Bekerja	436.059	250.771	686.830
Pengangguran terbuka	10.560	7.783	18.343
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>			
Sekolah	33.555	33.294	66.849
Mengurus Rumah Tangga	26.359	190.183	216.542
Lainnya	28.396	5.995	34.391
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	83,49	52,98	68,93
Tingkat Pengangguran (%)	2,36	3,01	2,60

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017)

Menurut lapangan pekerjaan, sebanyak 220.658 Penduduk Usia Kerja (PUK) bekerja di sektor pertanian; 148.989 orang di sektor perdagangan, hotel dan restoran; 121.562 orang di sektor jasa kemasyarakatan; dan 78.856 orang di sektor pertambangan (BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017)

### 2.1.3. Infrastruktur

Infrastruktur mencakup kebutuhan fisik yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi daerah berupa sarana transportasi darat, laut, dan udara; ketersediaan air dan listrik.

Jalan sebagai salah satu prasarana utama transportasi darat yang sangat penting untuk menghubungkan aktifitas masyarakat. Status jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari jalan negara (600,40 km) dan jalan provinsi (899,33 km). Sebagian besar status jalan provinsi dalam kondisi sedang-baik (92,51%) dan sisanya (7,49%) dalam keadaan rusak berat.

Selain sarana transportasi darat, transportasi laut merupakan sarana transportasi yang strategis bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wilayah kepulauan. Jumlah pelabuhan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 8 (delapan) pelabuhan yang terdiri dari 3 (tiga) pelabuhan khusus barang dan 5 (lima) pelabuhan untuk penumpang. Nama pelabuhan yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 4. Kunjungan kapal di pelabuhan di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 masih didominasi oleh kapal milik pelayaran dalam negeri sebanyak 1.988 unit, dan pelayaran luar negeri sebanyak 100 unit. Jalur pelayaran dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tujuan ke Jakarta, Palembang, Tanjung Pinang, Surabaya dan Pontianak. Pelabuhan yang terbesar dan tersibuk adalah Pelabuhan Pangkal Balam. Sedangkan pelabuhan terkecil adalah Pelabuhan Sungai Selan.

Tabel 4 Pelabuhan di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016.

No	Nama Pelabuhan	Lokasi	Instansi
1.	Pangkal Balam	Kota Pangkalpinang	PT Pelindo II Cabang Pangkalpinang
2.	Belinyu	Kabupaten Bangka	
3.	Tanjung Kalian (Muntok)	Bangka Barat	
4.	Sungai Selan	Bangka Tengah	
5.	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung	Kantor UPP kelas I Cabang Belitung
6.	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan	
7.	Manggar	Kabupaten Belitung	
8.	Dendang	Timur	

Sumber: Statistik Transportasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2016)

Sarana lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah transportasi udara yang umumnya mengangkut penumpang. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 2 (dua) pelabuhan udara yaitu: Bandar Udara Depati Amir di Pulau Bangka dan Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin di Pulau Belitung. Frekuensi kedatangan dan keberangkatan pesawat yang lebih ramai adalah di Bandar Udara Depati Amir. Total jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat selama tahun 2016 sebanyak 8.205 pesawat, dengan kedatangan penumpang rata-rata 150.402 dan keberangkatan 150.563 orang. Sedangkan di Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin sebesar 3.973 pesawat dengan rata-rata penumpang yang datang dan berangkat masing-masing 66.825 dan 66.836 orang per bulan.

PLN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 mengelola 68 unit pembangkit listrik dimana kapasitas pembangkit listrik yang tersambung sebesar 75.145.885 KVA dan daya terpasang sebanyak 276.304 kW. Daya tersambung terbesar ada pada konsumen rumah tangga, yaitu sebesar 391.094 kVA (63,72 %). Sementara itu, daya tersambung untuk usaha dan industri adalah 170.293 kVA atau 27,74 %. Sisanya adalah instansi pemerintah, sarana ibadah, dan lainnya sebesar 52.404 kVA (8,54 %). Pada tahun 2016, jumlah pelanggan listrik bertambah menjadi 391.389 pelanggan

(naik 5,53%). Sementara itu, pengadaan listrik oleh PLN di pedesaan paling banyak terdapat di Kabupaten Bangka yaitu 70 desa dimana ada 51.026 rumah tangga yang dilayani.

Air merupakan kebutuhan dasar baik bagi rumah tangga maupun industri. Jumlah air yang disalurkan pada tahun 2016 sebanyak 6.274.694 m<sup>3</sup> dengan jumlah pelanggan 19.302. Jumlah pelanggan dan air yang disalurkan di setiap kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 5.

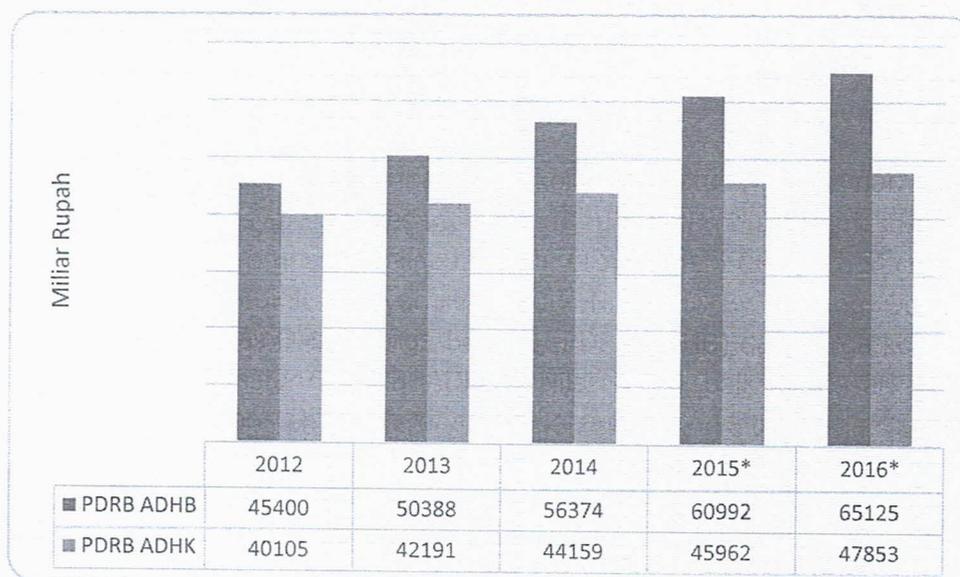
Tabel 5 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Pelanggan	Air yang Disalurkan (m3)
<b>Kabupaten</b>		
Bangka	7.163	2.014.645
Belitung	2.441	23.803
Bangka Barat*		
Bangka Tengah	913	166.033
Bangka Selatan	1.940	28.960
Bangka Timur	2.951	740.173
<b>Kota</b>		
Pangkalpinang	3.894	3.301.080
Jumlah	19.302	6.274.694

Sumber: BPS Provinsi Bangka Belitung(2017)

#### 2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

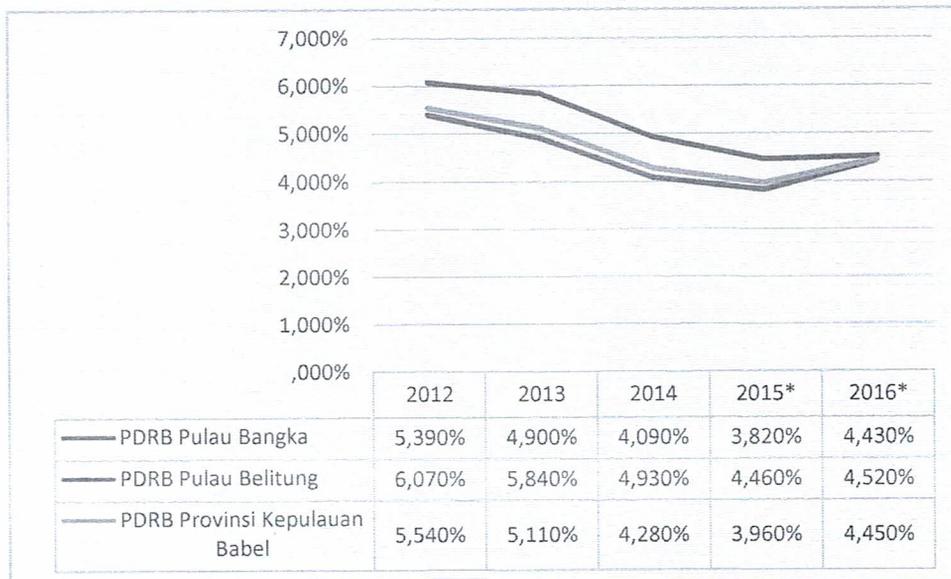
Salah satu indikator perkembangan ekonomi suatu wilayah dan indikator ukuran kemakmuran masyarakat secara makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah bruto disebut juga agregat ekonomi yang dihasilkan masyarakat wilayah tersebut. Nilai PDRB dihitung berdasarkan harga berlaku (PDRB Atas Dasar harga Berlaku/ PDRB ADHB) dan harga konstan (PDRB Atas Dasar Harga Konstan/ PDRB ADHK). Nilai PDRB baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya rata-rata sebesar 9,5% berdasarkan harga berlaku, dan meningkat rata-rata 4,5% pada periode tahun 2012-2016. Gambar 2 menyajikan PDRB ADHB dan PDRB ADHK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2016.



Sumber: PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Lapangan Usaha 2012-2016

Gambar 2 PDRB ADHB dan PDRB ADHK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2016

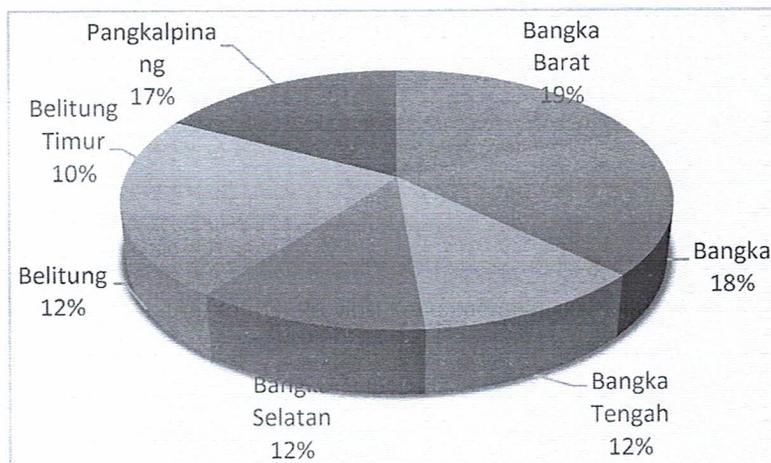
Pada tahun 2016, Pulau Bangka mampu menciptakan nilai tambah atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) sebesar 50,18 triliun rupiah atau menyumbang sebesar 77,45 % terhadap total PDRB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara Pulau Belitung mampu menyumbang sebesar 22,55 % dengan nilai tambah atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) sebesar 14,61 triliun rupiah. Kontribusi PDRB Pulau Belitung cenderung meningkat, sedangkan Pulau Bangka cenderung menurun. PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung melambat selama periode tahun 2012-2016, dimana peningkatan PDRB meningkat dari tahun 2015 ke 2016 sebesar 12,38%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 relatif membaik. Kondisi ini didorong oleh tumbuhnya aktivitas perdagangan, investasi fisik, dan penyedia makan minum. Selain itu, daya beli masyarakat cukup baik yang tercermin dari pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat ikut memberikan peranan terhadap ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Gambar 3 menyajikan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2012-2016, disertai dengan PDRB di Pulau Bangka dan Pulau Belitung.



Sumber: PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Lapangan Usaha 2012-2016

Gambar 3 PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Kontribusi PDRB terbesar berasal dari Kabupaten Bangka Barat, sedangkan persentase PDRB terkecil adalah Kabupaten Belitung Timur. Persentase PDRB dari setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersaji pada Gambar 4.



Sumber: PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Lapangan Usaha 2012-2016

Gambar 4 PDRB Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Struktur ekonomi yang dilihat dari PDRB ADHB menurut lapangan usaha suatu wilayah menunjukkan kontribusi masing-masing lapangan usaha dalam mendorong perekonomian daerah. Kontribusi PDRB berdasarkan kelompok lapangan usaha yang terdiri dari 17 kategori dapat dilihat pada Tabel 6. Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 ditopang oleh pertanian, kehutanan dan perikanan dan Industri pengolahan. Perekonomian di Pulau Bangka umumnya ditopang oleh industri pengolahan, sedangkan di Pulau Belitung didominasi oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kedua pulau tersebut memiliki potensi yang relatif berbeda.

Tabel 6 Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku berdasarkan Lapangan Usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2016 (dalam persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,87	18,40	19,22	19,78	20,15
2. Pertambangan dan Penggalian	15,36	14,09	13,53	12,69	11,89
3. Industri Pengolahan	24,33	23,99	22,84	21,13	20,05
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,05	0,07	0,08	0,10
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6. Konstruksi	7,76	8,21	8,36	8,63	8,82
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,64	13,24	13,50	14,16	14,83
8. Transportasi dan Pergudangan	3,47	3,70	3,77	4,03	4,05
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,19	2,29	2,35	2,40	2,47
10. Informasi dan Komunikasi	1,56	1,53	1,51	1,54	1,59
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,61	1,79	1,77	1,78	1,84
12. Real Estate	3,06	3,18	3,23	3,22	3,23
13. Jasa Perusahaan	0,26	0,27	0,27	0,28	0,27
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,94	5,20	5,37	5,69	5,84
15. Jasa Pendidikan	2,20	2,35	2,42	2,70	2,91
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,10	1,11	1,17	1,17
17. Jasa Lainnya	0,61	0,63	0,66	0,70	0,77
PDRB dengan Migas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017)

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2016 memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB. PDRB dari sektor tersebut selama tahun 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan rata-rata 3,10%. Sedangkan kategori Pertambangan dan Penggalian; serta Industri Pengolahan cenderung menunjukkan nilai penurunan masing-masing rata-rata 6,19% dan 4,70% selama periode tahun 2012-2016. Kedua kategori ini mengalami pergerakan yang searah mengingat kontributor terbesar bagi kategori Industri Pengolahan berasal dari industri logam dasar yang bahan bakunya berupabijih timah.

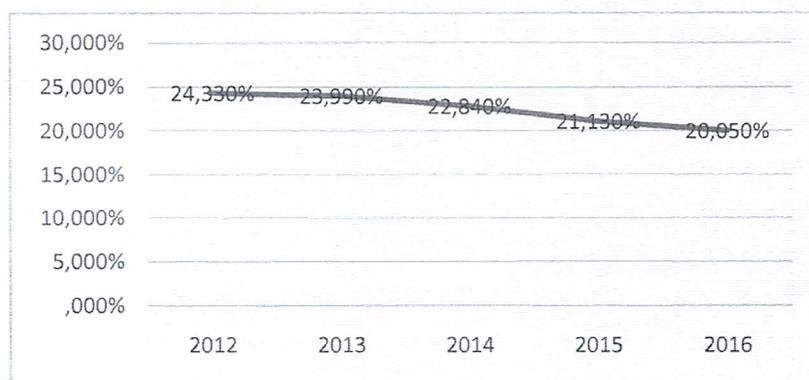
Timah merupakan komoditas utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, bijih timah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui

sehingga komoditas tersebut akan habis. Selain itu, permintaan bijih timah internasional cenderung menurun. Komoditas yang memberikan kontribusi terbesar dari kategori Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah komoditas perikanan dan beberapa komoditas perkebunan seperti lada, kelapa sawit dan karet. Potensi laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat besar untuk dikembangkan ke depan.

## Sektor Industri

Sektor industri pengolahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan pertumbuhan yang melambat dan cenderung menurun. Pertumbuhan tertinggi selama periode tahun 2012-2016, dicapai pada tahun 2012 yaitu sekitar 24,33%. Rata-rata persentase PDRB sektor industri pengolahan pada tahun 2012-2016 mengalami penurunan 4,70%. Hal tersebut dapat dilihat pada

Gambar 5.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017)

Gambar 5 Persentase PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Tabel 7 menyajikan secara rinci persentase PDRB ADHB dari sektor industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 sampai 2016. Sektor industri pengolahan memiliki 16 lapangan usaha. Industri logam dasar memberikan kontribusi terbesar selama tahun 2012-2016 (13,10%), namun cenderung mengalami tren penurunan rata-rata pada periode tersebut sebesar 8,48%. Peringkat kedua yang memberikan kontribusi terhadap PDRB industri pengolahan adalah industri makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman cenderung mengalami peningkatan nilai PDRB rata-rata 3,15 % pada tahun 2012-2016.

Tabel 7 Persentase PDRB ADHB untuk Industri Pengolahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Industri Makanan dan Minuman	5,79	5,99	6,31	6,54	6,55
3. Industri Pengolahan Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya	0,53	0,54	0,53	0,49	0,46
7. Industri Kertas dan Barang Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
8. Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
9. Industri Karet dan Barang dari Karet dan Barang dari Plastik	0,76	0,75	0,67	0,62	0,58
10. Industri Barang Galian Bukan Logam	1,37	1,46	1,37	1,30	1,22
11. Industri Logam Dasar	15,25	14,63	13,36	11,58	10,67
12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik	0,27	0,26	0,24	0,24	0,21
13. Industri Mesin dan Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Industri Alat Angkutan	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
15. Industri Furnitur	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Persentase PDRB industri Pengolahan	24,33	23,99	22,84	21,13	20,05

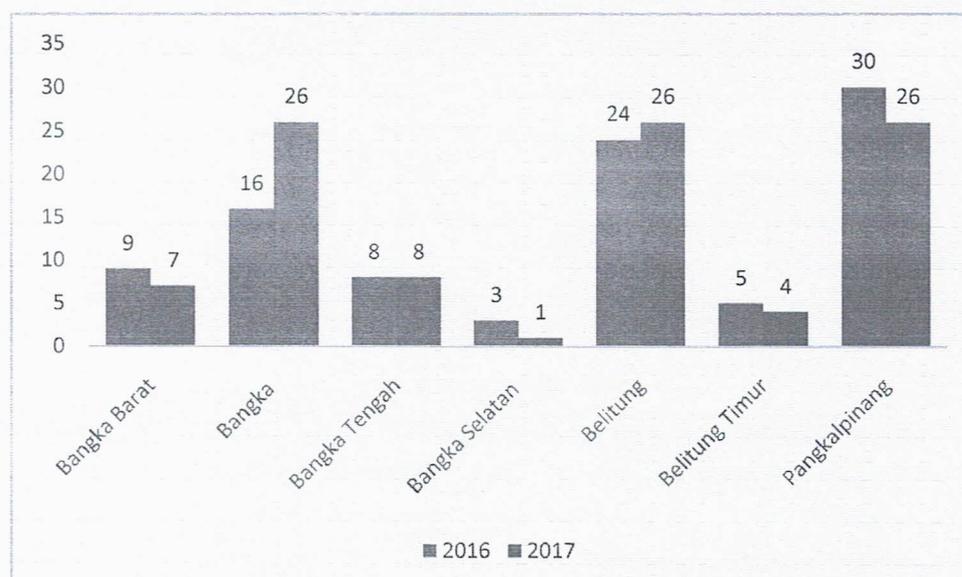
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017)

### Jumlah unit usaha setiap sektor industri

Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang aktif pada tahun 2015 masih didominasi Industri Pembuatan Logam Dasar bukan Besi dengan jumlah sebanyak 31 perusahaan (26,27 %), lalu disusul oleh Industri Barang Galian Bukan Logam sebanyak 24 perusahaan (20,39 %). Pada posisi ketiga adalah Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (CPO) dengan jumlah sebanyak 17 perusahaan (14,41 %).

Jumlah perusahaan industri besar dan sedang tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 98 perusahaan, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (95 perusahaan).

Gambar 6 menyajikan jumlah perusahaan sedang dan besar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Kabupaten dan Kota pada tahun 2016 dan 2017.



Sumber: Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017)

Gambar 6 Jumlah Perusahaan Sedang dan Besar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016-2017

Jumlah perusahaan makanan menempati jumlah terbanyak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (38 buah). Industri Pengolahan Lainnya dan industri furnitur menempati posisi ketiga.

Tabel 8 Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017

Lapangan Usaha	Jumlah
1. Industri Makanan	38
2. Industri Minuman	7
3. Industri Tekstil	2
4. Industri Pakaian Jadi	1
5. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus	2
6. Industri Percetakan	1
7. Industri Karet dan Barang dari Karet dan Plastik	3
8. Industri Barang Galian Bukan Logam	15
9. Industri Logam Dasar	23
10. Industri Alat Angkutan	24
11. Industri Furnitur	30
12. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	31
JUMLAH	98

Sumber: Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017)

Kelompok komoditi minyak dan lemak hewani atau nabati merupakan komoditas yang banyak diekspor dengan nilai berat bersih 191.400 ton. Sedangkan, nilai ekspor tertinggi berasal dari barang-barang dari timah. Ekspor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan kelompok komoditi dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Ekspor berdasarkan Kelompok Komoditi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

HS	Kelompok Komoditi	Berat bersih (kg)	Nilai (US\$)
03	Hasil Perikanan dan Olahan	3.005.720	5.559.658
09	Kopi, Teh, dan Rempah	3.308.000	38.422528
14	Bahan-Bahan Nabati	13.522.986	921.535
15	Minyak dan Lemak Hewani atau Nabati	191.400.351	118.294.315
23	Residu dan Sisa dari Industri Makanan, Olahan Makanan Hewan	21.000.000	1.731.941
25	Garam, Sulfur, Tanah dan Batu	8.000.000	357.768
38	Berbagai Produk Kimia	8.299.731	4.755.606
40	Karet dan Barang-Barang dari Karet	4.838.400	6.261.313
80	Barang-Barang dari Timah	53 161 115	963.829.182
	Jumlah	306.536.303	1.140.133846

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017)

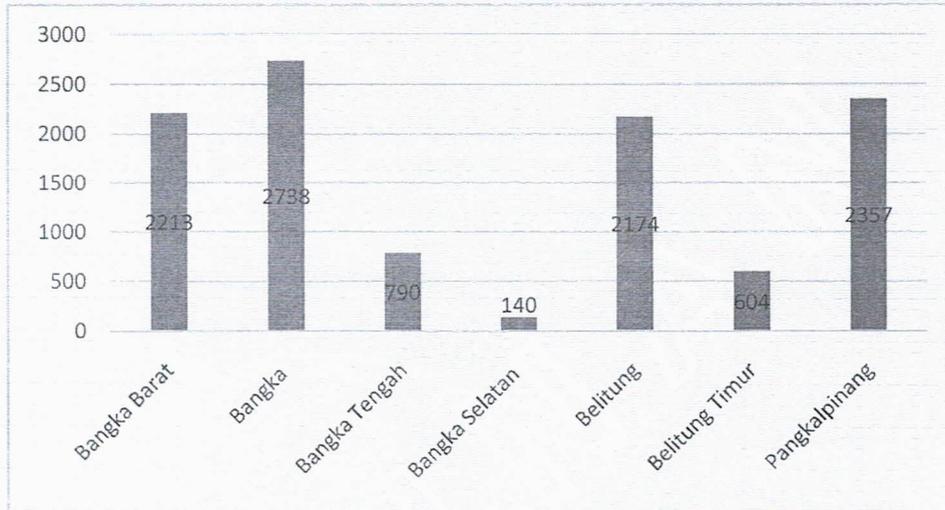
Nilai impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 adalah 132 juta dollar AS, dengan berat bersih 150.505 ton. Nilai impor terbesar masuk melalui pelabuhan Pangkalbalam (49,95 juta dollar AS). Kelompok komoditas bahan bakar minyak dan bahan bakar lainnya diimpor paling tinggi (116.268, 5 ton) dengan nilai 41.406.042 juta dollar AS.

## 2.2. SUMBER DAYA INDUSTRI

Sumber daya industri mencakup sumber daya manusia (SDM) sektor industri, sumber daya alam, lembaga pendidikan dan pelatihan dan penelitian dan pengembangan. Sektor industri besar dan sedang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 mampu menyerap 8.560 tenaga kerja yang bekerja dibagian produksi dan 2.417 tenaga kerja lainnya. Perbandingan gender untuk semua pekerja adalah 84,43 % tenaga kerja pria dan 15,57 % tenaga kerja wanita terhadap total jumlah tenaga kerja. Jika dilihat menurut kode KBLI 3 digit industri

besar dan sedang, sub sektor Pembuatan Logam Dasar bukan Besi merupakan subsektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar yaitu sebesar 4.521 tenaga kerja, disusul dengan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit yaitu sebesar 2.380 tenaga kerja. Kedua lapangan usaha ini merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan persentase sebesar 62,64 % dari total tenaga kerja industri besar dan sedang.

Dari ke tujuh kabupaten/kota, yang menyerap tenaga kerja terbesar adalah industri besar dan sedang yang ada di Kabupaten Bangka dengan 2.738 tenaga kerja, diikuti oleh Kota Pangkalpinang sebesar 2.357 tenaga kerja. Ditempat ketiga adalah Kabupaten Bangka Barat yang mampu menyerap 2.213 tenaga kerja (Tabel 10).



Statistik Industri Besar dan Sedang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017)

Gambar 7 Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2016

Sumber Daya Industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 10. Tabel 10 Sumber Daya Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

No	Sumber Daya Industri	2016
1	Tenaga kerja sektor industri sedang dan besar	8.560 orang
2	Pemanfaatan sumber daya alam utama <b>terbarukan</b> sebagai bahan baku :	
	a. Kelapa sawit	120.222 ton
	b. Lada	33.180 ton
	c. Karet	51.286 ton
	d. Perikanan Tangkap	196 704 ton
	e. Perikanan Budidaya	4.618,87 ton
2	Pemanfaatan sumber daya alam tidak <b>terbarukan</b> sebagai bahan baku:	
	a. Bijih timah	56.906,44ton Sn
	b. Logam timah	55.768,98 metrik ton
3	Lembaga Pendidikan	
	a. Pendidikan Tinggi	
	- Jumlah	15 unit
	- Kapasitas	19.446 orang
	b. Sekolah Menengah Kejuruan	
	- Jumlah	54 unit
	- Kapasitas	23.134 orang

No	Sumber Daya Industri	2016
4	Jumlah lembaga Pelatihan	3 unit
5	Jumlah lembaga LITBANG	8 unit
6	Jumlah investasi industri (akumulatif hingga 2016)	3.060 milyar Rupiah

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017) dan

<http://bpptpm.babelprov.go.id/sites/default/files/data/REALISASI%20INVESTASI%20untuk%20website.pdf>

(diolah)

## 2.3. SARANA PRASARANA

Pengembangan industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang menunjang. Sarana prasarana tersebut meliputi pengelolaan lingkungan, ketersediaan lahan industri yang berupa kawasan industri dan atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, dan kawasan pergudangan. Data atau informasi mengenai sarana dan prasarana tersebut diuraikan berikut ini.

### 2.3.1. Pengelolaan Lingkungan

Untuk pengelolaan lingkungan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Badan Pengelola lingkungan yaitu Badan Lingkungan Hidup Daerah. Selain itu juga terdapat laboratorium pengujian limbah yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### 2.3.2. Lahan Industri berupa Kawasan Industri dan atau Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan pengembangan industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 7 (tujuh) kawasan dengan total luas kawasan sekitar 15.158 ha. Rincian luas untuk setiap kawasan industri beserta dasar hukum dan bidang kewenangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11 Kawasan Pengembangan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama Kawasan Industri	Dasar Hukum Pembentukan Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Bidang Kewenangan
1.	Kawasan Peruntukan Industri Ketapang Pangkalpinang	Perda Kota Pangkalpinang No.1 Th 2012 ttg RTRW Kota Pangkalpinang 2011-2030	± 440	Pemkot Pangkalpinang
2.	Kawasan Peruntukan Industri Tanjung Ular dan sekitar Tanjung Kalian	Perda Kab. Bangka Barat No.1 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Bangka Barat 2014-2034	± 1.414	Pemkab Bangka Barat
3.	Kawasan Industri Jelitik, Sungailiat	Perda Kab. Bangka No. 15 Tahun 2014 ttg RDTR Sungailiat 2014-2034	± 253	Pemkab Bangka
4.	Kawasan peruntukan industri Sadai	Perda Kab. Bangka Selatan No.6 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Bangka Selatan 2014-2034	± 3.086	Pemkab Bangka Selatan
5.	Kawasan peruntukan industri Suge	Perda Kab. Belitung No.3 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Belitung 2014-2034	± 1.414	Pemkab Belitung
6.	Kawasan industri Air	Perda Kab. Belitung Timur	± 1.532	Pemkab

No	Nama Kawasan Industri	Dasar Hukum Pembentukan Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Bidang Kewenangan
	Kelik	No.13 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Belitung 2014-2034		Beltim
7.	Kawasan peruntukan industri di Lubuk Besar	Perda Kab. Bangka Tengah No.48 Tahun 2011 ttg RTRW Kab. Bangka Tengah 2011-2031	± 7.019	Pemkab Bangka Tengah
	<b>Total Luas Kawasan</b>		<b>± 15.158</b>	

Sumber: Perda tentang RTRW Kota/Kab

Selain data tersebut, terdapat 15 kawasan strategis provinsi yang dilihat dari sudut kepentingan ekonomi, sebagai berikut:

1. Kawasan industri dan pelabuhan Teluk Kelabat Belinyu, Kabupaten Bangka.
2. Kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Berikat (Kecamatan Lubuk Besar), Kabupaten Bangka Tengah.
3. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Muntok di Kawasan Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat.
4. Kawasan Bandar Udara Depati Amir Pangkalanbaru dan Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin Tanjungpandan.
5. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan.
6. Kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan.
7. Kawasan pelabuhan dan industri Sadai, Kabupaten Bangka Selatan.
8. Kawasan industri terpadu Suge dan pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Badaudan Membalong Kabupaten Belitung.
9. Kawasan minapolitan Selat Nasik, Kabupaten Belitung.
10. Kawasan industri perikanan Tanjung Binga, Kabupaten Belitung.
11. Kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung) Kabupaten Belitung Timur.
12. Kawasan pelabuhan ASDP Manggar — Ketapang, Kabupaten Belitung Timur.
13. Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK), Kabupaten Belitung Timur.
14. Kawasan pariwisata Tanjung Kelayang — Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung
15. Kawasan Iintas timur Pulau Bangka.

Sumber: [www.babelprov.go.id](http://www.babelprov.go.id)

### 2.3.3. Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan

Fasilitas jaringan energi dan kelistrikan pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 12, Tabel 13, dan Tabel 14 yaitu meliputi (1) Jumlah tenaga listrik yang diproduksi dan disalurkan oleh PLN Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (2) Jumlah pelanggan, daya terpasang dan kapasitas tersambung pada PLN menurut Kabupaten/Kota, serta (3) Jumlah pembangkit, daya terpasang pada PLN menurut Kabupaten/Kota.

Tabel 12 Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi dan Disalurkan oleh PLN Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Pembangkit	Unit	41
2	Jumlah Pelanggan	Pelanggan	391.389

No	Uraian	Satuan	Jumlah
	a. Rumah tangga	Pelanggan	359.270
	b. Industri	Pelanggan	289
	c. Dinas / Instansi/Gedung	Pelanggan	3.465
	d. Sarana Ibadah / Sosial	Pelanggan	6.198
	e. Perusahaan/usaha	Pelanggan	21.958
	f. Lain lain	Pelanggan	209
3	Banyaknya Daya Terpasang	KW	250.409
4	Jumlah Kapasitas Tersambung	KVA	613.792
5	Jumlah Produksi	MWH	935.574

Sumber : Biro Pusat Statistik, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka (2017)

Tabel 13 Jumlah Pelanggan, Daya Terpasang dan Kapasitas Tersambung Pada PLN Menurut Kabupaten/Kota, 2016

No	Kabupaten/Kota	Banyaknya Pelanggan	Daya Terpasang Pembangkit (kW)	Kapasitas Tersambung (kVA)
1	Bangka	55.605	165.289	88.096
2	Belitung	53.217	60.240	93.760
3	Bangka Barat	53.854	15.683	64.495
4	Bangka Tengah	19.971	9.531	25.787.750
5	Bangka Selatan	43.853	10.741	48.818.950
6	Belitung Timur	33.348	14.820	49.195
7	Kota Pangkalpinang*	131.541	-	243.639
	<b>Jumlah / Total (2016)</b>	391.389	276.304	75.145.885
	<b>2015</b>	370.881	265.369	558.562.699
	<b>2014</b>	339.065	118.664	511.787
	<b>2013</b>	298.971	88.182	455.781
	<b>2012</b>	258.628	88.036	375.907

Catatan : \* Pangkalpinang tidak memiliki pembangkit listrik tersendiri sehingga data tergabung dengan Kabupaten Bangka

Sumber : Biro Pusat Statistik, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka (2017)

Tabel 14 Jumlah Pembangkit dan Daya Terpasang Pada PLN Menurut Kabupaten/Kota, 2016

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangkit (Unit)	Daya (kW)	
			Terpasang	Mampu
1	Bangka	17	165.289	123.700
2	Belitung	14	60.240	39.250
3	Bangka Barat	11	15.683	7.050
4	Bangka Tengah	8	9.531	8.600
5	Bangka Selatan	10	10.741	9.525
6	Belitung Timur	8	14.820	12.540
7	Kota Pangkalpinang*		-	
	<b>Jumlah / Total (2016)</b>	68	276.304	200.665
	<b>2015</b>	88	265.369	179.873
	<b>2014</b>	60	118.664	74.462
	<b>2013</b>	57	88.182	57.825
	<b>2012</b>	56	88.036	61355

Catatan : \* Pangkalpinang tidak memiliki pembangkit listrik tersendiri sehingga data tergabung dengan Kabupaten Bangka

### 2.3.4. Fasilitas Jaringan Telekomunikasi

Untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi dalam pengembangan industri, terdapat pelayanan jasa pos dan telekomunikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu meliputi pengiriman surat, kargo, telepon, dan *facsimile*. Selain itu juga terdapat 3 (tiga) provider seluler di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Telkomsel, Excelcomindo, dan Indosat. Jumlah kantor pos pembantu menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15 Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013 – 2016

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016
1	Bangka	3	3	5	5
2	Belitung	1	1	5	4
3	Bangka Barat *	4	4	5	4
4	Bangka Tengah	4	4	7	6
5	Bangka Selatan	2	2	2	3
6	Belitung Timur	3	3	4	4
7	Kota Pangkalpinang	2	3	3	3
	<b>Jumlah / Total</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>29</b>

Sumber: Biro Pusat Statistik, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka (2017)

### 2.3.5. Fasilitas Jaringan Sumber daya Air

Selain jaringan telekomunikasi, ketersediaan sumber daya air juga penting untuk diperhatikan dalam pengembangan industri. Fasilitas sumber daya air yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut.

Tabel 16 Kapasitas Produksi Potensial Perusahaan Air Bersih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (liter per detik)

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kapasitas	1.350	895	1.250	840	528	693

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Tabel 17 Jumlah Air Bersih yang Disalurkan Perusahaan Air Bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Ribu m<sup>3</sup>)

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah	15.975	16.863	20.808	18.110	19.077	21.817

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Tabel 18 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Pelanggan	Air Disalurkan (m <sup>3</sup> )	Nilai (Rp)
1	Bangka	7.163	2.014.645	-
2	Belitung	2.441	23.803	-
3	Bangka Barat *	-	-	-
4	Bangka Tengah	913	166.033	653.708.550
5	Bangka Selatan	1.940	28.960	-
6	Belitung Timur	2.951	740.173	1.750.491.940
7	Kota Pangkalpinang	3.894	3.301.080	512.791.250
	<b>Jumlah / Total (2016)</b>	<b>19.302</b>	<b>6.274.694</b>	<b>2.916.991.740</b>

Catatan : \* Data Bangka Barat belum diperoleh,

### 2.3.6. Fasilitas Sanitasi

Sanitasi merupakan cara untuk menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Sanitasi meliputi pelayanan air limbah, persampahan, drainase, kesehatan dan kebersihan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan upaya untuk mengatasi sanitasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Program Percepatan Sanitasi (PPS) dan alokasi anggaran sanitasi oleh pemerintah daerah melalui APBD. Laporan Kemajuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Laporan Persentase Akses Jamban Sehat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 19 Kemajuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

No	Kabupaten/ Kota	Identitas Data			Kemajuan 2016			
		Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah KK	JSP	JSSP	Sharing	BABS
1	Bangka	8	77	83.148	68.870	4.669	1.074	8.529
2	Belitung	5	49	53.077	43.389	787	1.234	7.667
3	Bangka Barat	6	64	49.550	38.702	1.107	1.152	8.589
4	Bangka Tengah	6	63	43.246	21	38.727	2.144	2.354
5	Bangka Selatan	8	53	40.724	34.708	6.746	2.655	5.615
6	Belitung Timur	7	39	33.808	23.454	514	381	9.549
7	Kota Pangkalpinang	7	42	65.220	64.251	233-	147	958
	<b>Jumlah / Total</b>	<b>47</b>	<b>387</b>	<b>377.863</b>	<b>273.401</b>	<b>52.783</b>	<b>8.787</b>	<b>42.892</b>

Sumber : Laporan Kemajuan STBM Provinsi Kep.Bangka Belitung Tahun 2016, Departemen Kesehatan-Republik Indonesia. Sekretariat STBM Nasional

Keterangan:

- JSP : Akses Jamban Sehat Permanen
- JSSP : Akses Jamban Sehat Semi Permanen
- Sharing : Masih Numpang Ke Jamban Sehat
- BABS : Masih Buang Air Sembarangan

Tabel 20 Persentase Akses Jamban Sehat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	% Akses Jamban sehat
1	Bangka	91,47
2	Belitung	-
3	Bangka Barat	90,42
4	Bangka Tengah	93,26
5	Bangka Selatan	86,16
6	Belitung Timur	66,50
7	Kota Pangkalpinang	-
	<b>Persentase Akses Jamban</b>	<b>87,59</b>

Sumber : Laporan Kemajuan STBM Provinsi Kep.Bangka Belitung Tahun 2016, Departemen Kesehatan-Republik Indonesia. Sekretariat STBM Nasional

### 2.3.7. Fasilitas Jaringan Transportasi dan Infrastruktur Penunjang, Lembaga Uji, Kawasan Berikat, Kawasan Pergudangan

Fasilitas Jaringan Transportasi yang meliputi panjang jalan menurut jenis permukaan, kondisi jalan, dan pemerintahan yang berwenang mengelola, serta panjang jembatan menurut jenis konstruksi dan pemerintahan yang berwenang mengelola di Provinsi Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan, dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Bangka Belitung (km) Tahun 2016

No	Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan	Pemerintah Yang Berwenang Mengelola		
		Negara (km)	Provinsi (km)	Jumlah (km)
1.	Jenis Permukaan			
	1. Diaspal	600,40	899,33	1.499,73
	2. Kerikil	0,00	0,00	0,00
	3. Tanah	0,00	0,00	0,00
2.	Kondisi Jalan			
	1. Baik	532,88	432,23	965,11
	2. Sedang	65,32	399,73	465,05
	3. Rusak	1,90	52,89	54,79
	4. Rusak Berat	0,30	14,48	14,78
	Jumlah	600,40	899,33	1.499,73

Sumber : Biro Pusat Statistik, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka (2017)

Tabel 22 Panjang Jembatan Menurut Jenis Konstruksi dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Bangka Belitung (m) Tahun 2016

No	Jenis Konstruksi	Pemerintah Yang Berwenang Mengelola		
		Negara	Provinsi	Jumlah
1	Beton+Kayu / Baja+Kayu	0,00	81,30	81,30
2	Beton Bertulang	1.727,00	253,20	4.264,20
3	Rangka Baja	1.032	813,70	1.845,70
	Jumlah 2016	2.759,00	3.432,20	6.191,20
	2015	2.796,18	3.432,20	6.228,38
	2014	2.261,00	3.432,20	5.693,40
	2013	2.228,00	3.432,20	5.660,20
	2012	2.173,00	3.432,20	5.605,20

Sumber : Biro Pusat Statistik, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka (2017)

Selain fasilitas jaringan transportasi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki infrastruktur penunjang yang meliputi lembaga uji dan kawasan pergudangan. Lembaga Uji yang ada adalah Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan, dan UPTD Balai Sertifikasi Pengujian Mutu Barang (BSPM). Untuk kawasan pergudangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23 Luas Area Gudang pada Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama Pelabuhan	Luas Area Gudang Terbuka ( m <sup>2</sup> )	Luas Area Gudang Tertutup ( m <sup>2</sup> )
1	Pelabuhan Pangkalbalam	1.700 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>
2	Pelabuhan Muntok	400 m <sup>2</sup>	485 m <sup>2</sup>
3	Pelabuhan T. Kelian & ASDP		
4	Pelabuhan Tanjung Gudang		

No	Nama Pelabuhan	Luas Area Gudang Terbuka ( m <sup>2</sup> )	Luas Area Gudang Tertutup ( m <sup>2</sup> )
5	Pelabuhan Sungaiselan	50 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>
6	Pelabuhan Jelitik	700 m <sup>2</sup>	360 m <sup>2</sup>
7	Pelabuhan Perikanan Pantai Sungai liat	408 m <sup>2</sup>	1.645 m <sup>2</sup>
8	Pelabuhan Sadai dan ASDP Sadai	750 m <sup>2</sup>	
9	Pelabuhan Toboali		
10	Pelabuhan Tanjung Pandan		400 m <sup>2</sup>
11	Pelabuhan Manggar & ASDP	4.681 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>
12	Pelabuhan ASDB Tg. Ruh		
13	Pelabuhan T. Batu	4.681 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>

Sumber : Dinas Perhubungan (2014)

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki sarana penunjang di wilayah pesisir seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel 24 Sarana Penunjang Wilayah Pesisir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (unit)

No.	Sarana	Bangka	Bangka Tengah	Bangka Barat	Belitung	Belitung Timur
1.	Gudang Pendingin (cold Storage)	-	-	-	10	6
2.	Pabrik Es	3	2	-	9	6
3.	Galangan Kapal Perikanan	-	-	-	8	1
4.	Bengkel Kapal Perikanan	5	-	-	3	1
5.	SPDN/SPBN	5	1	3	5	5
6.	Unit Usaha/Penjualan Sarana Perikanan	3	2	2	-	2
7.	Pasar Ikan	7	2	6	4	6
8.	Kedai Pesisir	15	-	-	40	52
9.	Sarana komunikasi dengan tenaga surya	-	-	1	-	-
10.	Sarana Air bersih	1	2	2	31	6
11.	Jetty	9	4	4	21	16
12.	Listrik Tenaga Surya (LTS)	1	1	1	3	16

Sumber: Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung dalam Angka (2016)

## 2.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

### 2.4.1. Sentra Industri Kecil Menengah

Rencana pembangunan industri juga perlu mengikutsertakan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Pembangunan dan pemberdayaan IKM dapat berperan dalam penguatan struktur industri secara keseluruhan. Perkembangan jumlah unit usaha industri kecil dan industri sedang (menengah) menurut komoditi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 25 dan Tabel 26. Pada tahun 2016, jumlah usaha industri kecil adalah sebesar 12.732 unit, sedangkan untuk industri menengah adalah 111 unit. Dengan demikian pada tahun 2016 jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah 12.843 unit.

Tabel 25 Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Menurut Komoditi (2012 – 2016) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Komoditi	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016

No	Komoditi	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pangan	3.213	4.365	5.726	6.407	6.901
2	Sandang	218	271	463	537	566
3	Kimia dan Bahan Bangunan	1.626	2.254	2.346	2.544	2.587
4	Logam dan Elektronik	1.071	1.221	1.428	1.524	1.559
5	Kerajinan	619	845	991	1.082	1.199
	<b>Total</b>	<b>6.747</b>	<b>8956</b>	<b>10.954</b>	<b>12.094</b>	<b>12.732</b>

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017)

Tabel 26 Jumlah Unit Usaha Industri Sedang Menurut Komoditi (2012 – 2016)

No	Komoditi	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pangan	17	20	27	29	31
2	Sandang	0	0	1	1	1
3	Kimia dan Bahan Bangunan	15	28	16	23	23
4	Logam dan Elektronik	48	61	58	56	53
5	Kerajinan	0	0	1	3	3
	<b>Total</b>	<b>80</b>	<b>109</b>	<b>103</b>	<b>112</b>	<b>111</b>

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017)

#### 2.4.2. Unit Pelayanan Teknis, Tenaga Penyuluh Lapangan, Konsultan Industri Kecil Menengah

Untuk mendukung pengembangan industri kecil dan menengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), tenaga penyuluh lapangan (TPL), dan konsultan industri kecil menengah. Jumlah UPT, TPL, dan konsultan IKM tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 27 Jumlah Unit Pelayanan Teknis, Tenaga Penyuluh Lapangan, dan Konsultan Industri Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Unit Pelayanan Teknis	1 unit	UPTD Balai Latihan Perkoperasian dan UMKM
2	Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan	19 orang	10 Orang tenaga penyuluh perindustrian 9 Orang tenaga penyuluh lapangan
3	Konsultan IKM	7 orang	

Sumber : kukm.babelprov.go.id

### 3. VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

#### 3.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif.

Visi dan Misi Pembangunan Industri mengacu kepada visi dan misi pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 – 2025. Sebagaimana termaktub dalam RPJPD Provinsi yang kemudian diperbaiki untuk tahun 2017 – 2022 dalam Rencana Strategis (Renstra) Provinsi bahwa visinya adalah *Bangka Belitung Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi*.

Untuk mencapai visi tersebut maka akan dilaksanakan melalui 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi

Visi pembangunan industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah "*Terwujudnya industri berbasis potensi daerah yang unggul dalam inovasi Agropolitan*"

Misi pembangunan industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan industri agropolitan
2. Meningkatkan akses pasar, kelancaran distribusi, pengamanan pasar dalam negeri serta perlindungan konsumen dan produsen
3. Meningkatkan peran perdagangan luar negeri

#### 3.2. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tujuan pembangunan industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat
3. Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah

#### 3.3. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Sasaran pembangunan industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran	Satuan	Tahun			
			2022	2027	2032	2037
1	Pertumbuhan sektor industri nonmigas	%	6,5	7,2	7,8	8
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB	%	24	27	30	33
3	Nilai ekspor produk industri nonmigas	Rp. triliun	5,5	6	9	14,5
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	orang	40.000	42.000	46.000	50.000

5	Nilai Investasi nonmigas akumulatif	Rp. triliun	1	1,5	3	5
---	-------------------------------------	-------------	---	-----	---	---

### 3.4. STRATEGI PENCAPAIAN DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Menumbuh-kembangkan industri pengolahan sumberdaya unggulan yang meliputi lada, perikanan, mineral tanah jarang ikutan timah, dan kelapa sawit dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing;
3. Mengembangkan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan;
4. Meningkatkan dukungan penguatan SDM, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat pada struktur industri antar satuan unit usaha;
5. Memperbaiki iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung-jawab;
6. Meningkatkan kerjasama antar institusi terkait (pusat-daerah, lembaga penelitian, dan sebagainya);
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur energi dan sistem logistik yang efisien dengan dukungan Ketersediaan sarana pelabuhan, transportasi air, kereta api dan jalan darat yang memenuhi standar Industri serta fasilitas penting untuk tumbuh dan berkembangnya industri;
8. Mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri;
9. Mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
10. Mengembangkan kawasan industri berbasis potensi daerah;
11. Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik daerah;
12. Membangun Kawasan Industri sesuai perencanaan; dan
13. Membangun sentra industri kecil dan industri menengah.

## 4. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

### 4.1. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Strategi pembangunan industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dirumuskan berdasarkan pendekatan hierarkis yang berhubungan dengan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Strategi pembangunan industri disusun dengan mengacu pada visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2025, yang kemudian diperbaiki untuk tahun 2017 – 2022 dalam Rencana Strategis (Renstra) Provinsi bahwa visinya adalah **Bangka Belitung Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi**. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan visi pembangunan industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu **"Terwujudnya industri berbasis potensi daerah yang unggul dalam inovasi Agropolitan"**.

Tahapan perumusan strategi pembangunan industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari tahap input dan pencocokan. Pada tahap *input* dibuat matriks Evaluasi Faktor Internal (EFI) dan Evaluasi Faktor Eksternal (EFE). Matriks EFI mencakup kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Sedangkan peluang dan ancaman pembangunan industri digambarkan dalam Matriks EFE. Pencocokan faktor internal dan eksternal merupakan kunci untuk merumuskan strategi dengan menggunakan matriks *Strengths Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT).

Perumusan strategi menggunakan analisis SWOT yang diperoleh dari pendapat *stakeholders*, sehingga merefleksikan pendapat kolektif suatu kelompok. *Focus groups* merupakan metode yang banyak dipakai untuk mengumpulkan pendapat dari *stakeholders* terkait (Leigh, 2010). Analisis SWOT merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi internal dan eksternal, serta merumuskan kegiatan di masa depan berdasarkan faktor-faktor tersebut (Leigh, 2010). Kondisi internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan kondisi eksternal terdiri dari peluang dan ancaman yang berasal dari luar. Evaluasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) dapat dilihat pada Tabel 28 dan

Tabel 29.

Tabel 28 Evaluasi Faktor-Faktor Internal Pengembangan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Faktor Internal	Bobot	Skor	Skor Terbobot
<b>Kekuatan</b>				
1.	Ketersediaan bahan baku melimpah, khususnya sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan bahan galian	0,19	3,86	0,73
2.	Jumlah penduduk yang mengalami peningkatan sebagai input tenaga kerja	0,12	3,48	0,42
3.	Keahlian dalam mengolah bahan baku khususnya pengolahan pangan yang sifatnya turun temurun	0,03	3,43	0,10
4.	Sudah adanya industri yang mampu mengolah bahan baku	0,04	3,56	0,14
<b>Kelemahan</b>				
5.	Akses permodalan terhadap lembaga keuangan terbatas	0,18	1,54	0,28
6.	Akses pasar masih terbatas			
7.	Belum memiliki visi yang sama tentang pengembangan industry	0,06	1,40	0,08
8.	Penggunaan teknologi dan mesin mesin produksi masih rendah	0,07	1,38	0,10
9.	Jiwa kewirausahaan rendah	0,07	1,46	0,10

10.	Ketersediaan dana dari lembaga keuangan formal maupun informal masih rendah	0,06	1,52	0,09
11	Sistem informasi belum optimal	0,05	1,48	0,07
12	Timbulnya pencemaran lingkungan	0,04	1,41	0,06

Sumber: Data diolah (2017)

Tabel 29 Evaluasi Faktor-Faktor Eksternal Pengembangan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Faktor Eksternal	Bobot	Skor	Skor Terbobot
<b>Peluang</b>				
1.	Provinsi Bangka Belitung berada di wilayah dengan kondisi geografis strategis	0,17	3,86	0,66
2.	Lahan tersedia banyak	0,19	3,67	0,70
3.	Permintaan domestik terhadap komoditas unggulan tinggi	0,09	3,63	0,33
4.	Kebijakan pemerintah mendukung pengembangan industri	0,11	3,67	0,40
5.	Dukungan pelabuhan laut yang memadai	0,07	3,76	0,26
6.	Dukungan Bandar udara yang memadai	0,06	3,83	0,23
<b>Ancaman</b>				
7.	Persaingan dengan produsen lainnya secara global misal pemasok dari Cina	0,03	1,50	0,05
8.	Persaingan dengan produsen lainnya di tingkat nasional	0,05	1,35	0,07
9.	Fluktuasi kurs mata uang	0,01	1,35	0,01
10.	Infrastruktur jalan belum mendukung pengembangan industri	0,05	1,55	0,08
11.	Ketersediaan energi air terbatas	0,06	1,65	0,10
12.	Ketersediaan listrik masih belum memadai	0,1	1,69	0,17

Sumber: Data diolah (2017)

Setelah mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal, selanjutnya dilakukan tahap pencocokan yang relatif sulit dan kritis dalam merumuskan strategi. Tujuan tahapan pencocokan adalah untuk merumuskan alternatif strategi yang layak, bukan untuk memiliki strategi terbaik. Salah satu alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matriks SWOT. Matriks ini membantu mengembangkan empat tipe strategi yaitu: SO (*strengths-opportunities*), WO (*weaknesses-opportunities*), ST (*strengths-threats*), dan WT (*weaknesses-threats*). Matriks ini menggambarkan peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Strategi yang baik adalah strategi yang mampu menetralkan ancaman dan menggali peluang dengan menekankan pada kekuatan dan menghindari kelemahan. Rumusan strategi difokuskan untuk mempertemukan kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan peluang dan ancaman yang ada.

Strategi pengembangan industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan kondisi internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas produksi industri pengolahan komoditas unggulan.
2. Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan.
3. Perluasan akses pasar.
4. Pengembangan *capacity building* tenaga kerja.
5. Peningkatan dukungan finansial.
6. Perbaikan infrastruktur.

7. Pembangunan industri pengolahan berwawasan lingkungan.
8. Pengembangan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan.
9. Peningkatan kerjasama antar institusi terkait.
10. Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis komoditi unggulan.

Strategi pembangunan industri Bangka Belitung perlu mengutamakan industri berbasis agro (pertanian/ perkebunan) dan bahari (sumber daya dan hasil laut). Krisis moneter 1997 yang bersamaan dengan jatuhnya harga berbagai komoditas unggulan seperti lada dan karet menyebabkan mereka beralih ke Tambang Inkovensional (TI), yang menghasilkan *cash* lebih cepat. Namun, saat ini kandungan bahan tambang semakin tipis dan eksploitasi tambang telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, mengembalikan masyarakat ke pertanian/ perkebunan dan meningkatkan nilai tambahnya melalui industri hilir sangat prospektif dilakukan. Sebagai wilayah kepulauan, Bangka Belitung juga memiliki potensi bahari yang strategis berupa hasil laut termasuk rumput laut dan ikan berbagai jenis. Keberlimpahan kedua sumberdaya ini (agro dan bahari) menjadi potensi sumber pasokan yang berkelanjutan bagi hilirasasi industri produk-produk turunan agro dan bahari dalam rangka peningkatan nilai tambah dan *multiplier effect* di masa depan.

Selain itu, strategi pembangunan industri harus mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang memberikan perhatian seimbang terhadap kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan industri dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas bahkan lintas generasi.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi dan penguasaan teknologi yang relevan diperlukan dalam mendukung pembangunan industri. Selain itu, reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk mengawal pembangunan industri sesuai tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem dan pelaksana birokrasi yang cakap profesional, beretos kerja tinggi, jujur dan berintegritas dibutuhkan untuk melaksanakan regulasi dengan tepat dan layanan dengan cepat dalam pembangunan industri.

## **4.2. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI**

Mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, maka program pembangunan industri dilakukan dengan memperhatikan dua hal penting, yaitu : 1) Kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan 2) Program pembangunan industri prioritas.

Kebijakan yang bersifat lintas sektoral meliputi Pengembangan Sumber Daya Industri, Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri, Pemberdayaan Industri, Perwilayahan Industri, Kebijakan Afirmatif IKM, Penyediaan fasilitas Fiskal & Non-Fiskal bagi pelaku industri. Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

### **4.2.1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi**

#### **a. Penetapan Industri Unggulan Provinsi**

Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 disebutkan bahwa terdapat 10 sektor industri yang menjadi prioritas pembangunan nasional selama dua puluh tahun yang akan datang. Sepuluh sektor prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Industri Pangan.
2. Industri Farmasi, Kosmetik & Alat Kesehatan.
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka.

4. Industri Alat Transportasi.
5. Industri Elektronika dan Telematika (ICT).
6. Industri Pembangkit Energi.
7. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri.
8. Industri Hulu Agro.
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam.
10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.

Diantara 10 sektor industri prioritas diatas, untuk wilayah pengembangan industri Sumatera Bagian Selatan, khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam dokumen RIPIN diarahkan untuk mengembangkan tiga sektor industri prioritas. Ketiga sektor industri priotitas yang harus dikembangkan dalam dua puluh tahun kedepan menurut dokumen RIPIN adalah: 1) sektor industri pangan, 2) industri hulu-agro, dan 3) industri logam dasar dan bahan galian bukan logam.

Selanjutnya, penetapan industri unggulan yang akan dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui beberapa tahap analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan *long list* komoditas unggulan dari sektor/ sub-sektor unggulan dan sektor/ sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan komoditi unggulan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Pemilihan komoditi unggulan dilakukan menggunakan sejumlah kriteria yang diatur dalam Permendagri No. 9 Tahun 2014 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Kriteria tersebut terdiri atas:

1. Penyerapan Tenaga Kerja

Produk unggulan daerah diproduksi dengan memanfaatkan tenaga kerja terampil di daerah sehingga memberi dampak pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat.

2. Sumbangan terhadap Perekonomian

Produk tersebut memiliki nilai ekonomis yang memberikan manfaat bagi konsumen, memiliki keterkaitan ke depan dan kebelakang, memberi efek berganda ekonomi dan sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan dan daerah yang memproduksi produk unggulan tersebut.

3. Sektor Basis Ekonomi Daerah

Produk tersebut masuk dalam kategori kelompok sektor basis dalam PDRB dan memberikan kontribusi terbesar dalam ekonomi daerah.

4. Dapat diperbaharui

Produk tersebut bukan barang tambang dan memanfaatkan bahan baku yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Barang tambang tidak dapat dimasukkan sebagai produk unggulan daerah meskipun saat itu memberi kontribusi ekonomi yang besar bagi daerah.

5. Unsur Sosial Budaya

Dalam menciptakan, memproduksi dan mengembangkan produk unggulan dibutuhkan talenta dan kelembagaan masyarakat yang dibangun dan dikembangkan atas dasar kearifan lokal yang bersumber pada ciri khas dan warisan budaya turun temurun serta kondisi sosial budaya setempat.

6. Ketersediaan Pasar  
Produk tersebut mampu terserap pada pasar lokal, regional dan nasional serta berpotensi untuk memasuki pasar global.
7. Bahan Baku Terjamin  
Ketersediaannya dengan perolehan harga yang kompetitif, terjamin kesinambungannya serta ramah lingkungan.
8. Modal  
Ketersediaan dan kecukupan dana bagi kelancaran usaha untuk kebutuhan investasi dan modal kerja.
9. Sarana dan Prasarana Produksi  
Ini menunjukkan kemudahan bagi pengusaha produk unggulan untuk memperoleh sarana dan prasarana produksi pada tingkat harga yang kompetitif dan mudah diperoleh.
10. Teknologi  
Yang relevan, tepat guna dan terdapat unsur yang tidak mudah ditiru.
11. Manajemen usaha  
Kemampuan mengelola usaha secara profesional dengan memanfaatkan talenta dan kelembagaan masyarakat.
12. Harga  
Kriteria ini mencerminkan kemampuan memberi nilai tambah dan mendatangkan laba usaha.

## **Metode penentuan jenis industri unggulan provinsi**

### **1. *Focus Group Discussion 1***

Untuk mengetahui jenis-jenis industri unggulan provinsi, maka dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang pertama, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Para *stakeholder* yang turut memberikan masukan adalah dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi, perwakilan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), dan para pelaku usaha yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil FGD pertama tersebut, munculah usulan 8 (delapan) industri unggulan provinsi, sebagai berikut:

- a) Industri pengolahan kelapa sawit;
- b) Industri pengolahan karet;
- c) Industri pengolahan lada;
- d) Industri pengolahan gaharu;
- e) Industri pengolahan rumput laut;
- f) Industri pengolahan kayu dan rotan alam;
- g) Industri pengolahan hasil perikanan; dan
- h) Industri pangan berbasis IKM.

Untuk mencari tiga (3) peringkat/prioritas usulan industri unggulan, maka dilakukan FGD kembali. Kuisisioner diberikan untuk mengetahui peringkat kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya, serta untuk mengetahui peringkat komoditas unggulan berdasarkan pencapaian kinerjanya. Pengolahan data

dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*).

## 2. Focus Group Discussion 2

FGD 2 dilakukan untuk mendalami potensi industri unggulan yang terdapat di seluruh kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. FGD 2 dilakukan di tujuh daerah dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Kota Pangkal Pinang, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Bangka Induk, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, dan Kab. Bangka Selatan, dengan melibatkan pihak Organisasi Pemerintah daerah, para pelaku usaha, dan BPS setempat.

Pada FGD 2 dilakukan diskusi mendalam antara pemangku kepentingan daerah untuk menggali lebih jauh industri unggulan daerah. Kuisisioner 1 dan 2 dilengkapi untuk mengetahui tingkat kepentingan dari 12 kriteria, dan tingkat pencapaian kinerja 8 usulan industri unggulan hasil FGD 1 sebelumnya. Analisis SWOT juga dilakukan untuk lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, potensi, dan ancaman terhadap industri usulan daerah yang bersangkutan.

Berikut adalah tabel peringkat kepentingan 12 kriteria dari seluruh lokasi hasil olahan kuisisioner pada FGD 1.

Tabel 30 Peringkat Kepentingan 12 Kriteria dari Seluruh Lokasi

Peringkat Kepentingan	Kriteria	Bobot Kepentingan
1	Penyerapan tenaga kerja	8,86%
2	Bahan baku	8,71%
3	Ketersediaan pasar	8,64%
4	Sumbangan terhadap perekonomian	8,56%
5	Modal	8,45%
6	Harga	8,43%
7	Sarana dan prasarana produksi	8,19%
8	Manajemen usaha	8,18%
9	Dapat diperbaharui	8,15%
10	Sektor basis ekonomi daerah	8,12%
11	Unsur sosial budaya	7,93%
12	Teknologi yang relevan, tepat guna dan terdapat unsur yang tidak mudah ditiru.	7,79%
		<b>100%</b>

Tabel 31 Tiga Peringkat Teratas (Top 3) Prioritas Komoditas Unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Peringkat Kinerja	Industri Olahan Komoditas	Nilai
1	Hasil perikanan	3,91
2	Lada	3,68
3	Kelapa sawit	3,66

Lima usulan komoditi industri lain selain tiga industri yang terpilih diatas tetap menjadi perhatian untuk dikembangkan. Selain tiga industri terpilih diatas berdasarkan proses FGD dengan *stakeholder* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi kriteria produk unggulan sebagaimana tertera pada Permendagri, ditentukan pula industri potensial yang akan

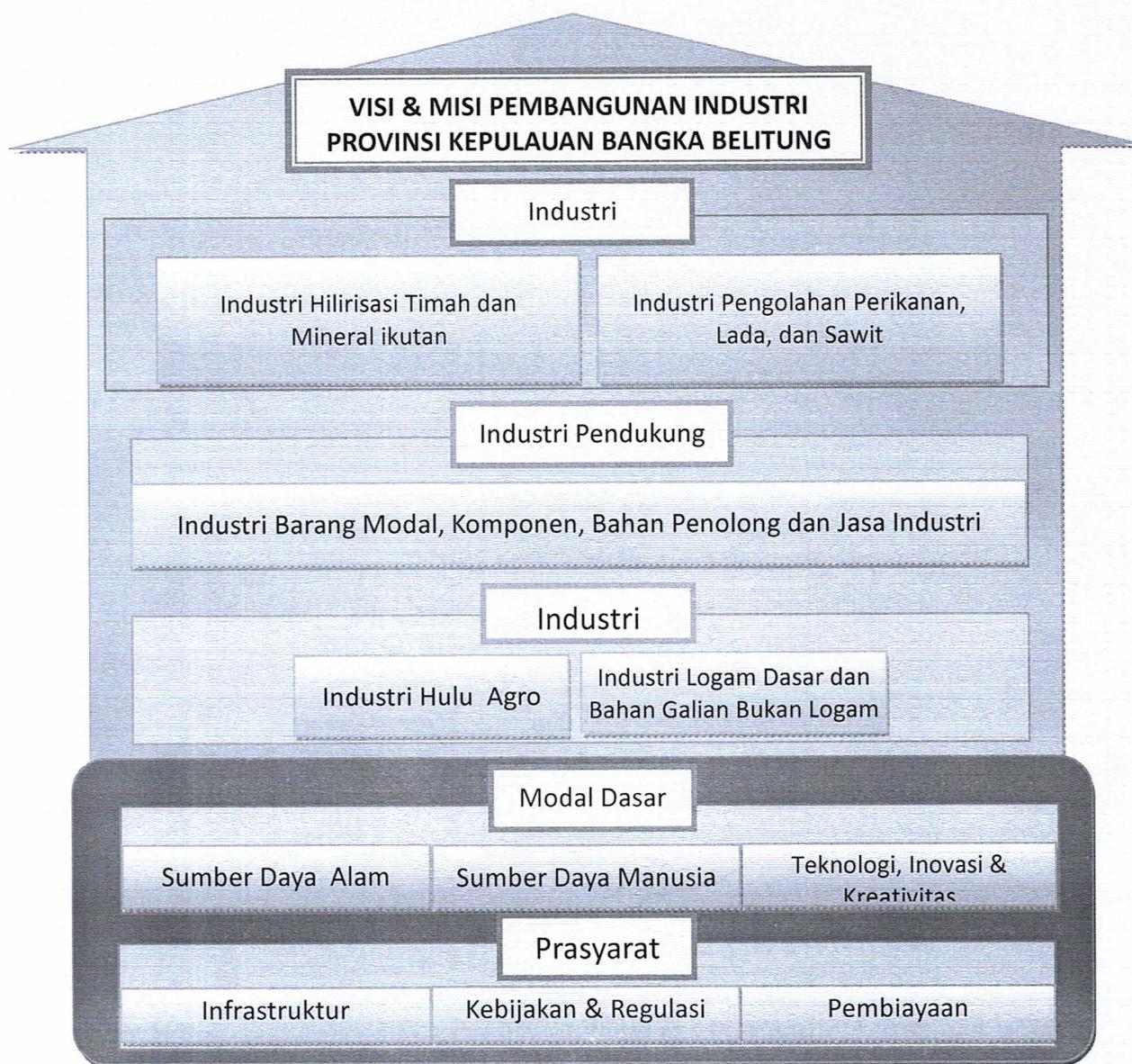
dikembangkan dalam dua puluh tahun mendatang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan kekhasan potensi yang ada di daerah. Yang dimaksud dengan industri potensial adalah industri yang masih membutuhkan penelaahan/penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan, namun memiliki prospek ekonomi yang bagus pada masa depan dan perlu dikelola peningkatan nilai tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Kepulauan Bangka Belitung merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Industri timah sendiri, sebagai industri yang sudah lama berkembang di Bangka Belitung, dapat dikatakan sudah mapan, dan tidak memerlukan kebijakan dan program yang spesifik untuk mendorong perkembangannya.

Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disebutkan bahwa Kepulauan Bangka Belitung termasuk dalam Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Sumatera bagian Selatan. Dimana prioritas pembangunan industri di wilayah ini adalah; 1) Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, 2) industri pangan, dan 3) industri hulu agro. Jenis industri logam dasar yang dimaksud mencakup industri pengolahan dan pemurnian logam dasar bukan besi (Timah), sementara industri pangan berfokus pada pengembangan industri pengolahan hasil laut. Industri hulu agro yang akan dikembangkan sebagaimana telah disebutkan di atas adalah industri pengolahan lada dan sawit.

Industri yang perlu dikembangkan pada dua puluh tahun yang akan datang berkaitan dengan bahan galian bukan logam adalah pengembangan pengolahan mineral ikutan. Sebagai daerah penghasil timah, Kepulauan Bangka Belitung memiliki cadangan mineral ikutan yang sangat besar dan diincar banyak negara asing. Pada umumnya, mineral ikutan tersebut berasosiasi dengan mineral lain atau sebagai mineral ikutan dalam mineral bijih atau konsentrat pada industri pertambangan bijih timah. Mineral-mineral ikutan dalam bijih timah mengandung unsur/logam bernilai ekonomi tinggi yang belum dimasukkan sebagai logam yang diperhitungkan dan dibuang sebagai tailing (bijih atau terak peleburan) atau ikut dalam konsentrat bijih. Mineral ikutan yang teridentifikasi dari penambangan timah antara lain: Ilmenit, Monazit, Xenotime, Zirkon, *Rare earth elements*, dll. Oleh karena itu dalam RPIP ini, industri pengolahan timah (hilirisasi timah) dan mineral ikutan tambang, dalam hal ini mineral ikutan timah merupakan industri yang potensial yang perlu diatur pengelolaannya agar lebih bisa memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan industri terpilih di atas, maka bangun industri daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 8 Bangun Industri Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039

Selanjutnya, tahapan pengembangan industri unggulan tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 32 Tahapan Pengembangan 3 Industri Unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI			
		2019 -2039	2019 -2039	2019 -2039	2019 -2039
1	Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri pangan olahan berbasis ikan dan hasil laut : abon, tepung ikan, surimi</li> <li>2. Industri pengeringan ikan dan biota perairan lainnya</li> <li>3. Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya</li> <li>4. Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri pangan olahan berbasis ikan dan hasil laut : abon, tepung ikan, surimi</li> <li>2. Industri pengeringan ikan dan biota perairan lainnya</li> <li>3. Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya</li> <li>4. Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya</li> <li>5. Industri pengolahan limbah ikan</li> <li>6. Cold storage</li> <li>7. Pabrik es kapasitas &gt; 100 ton/ hr</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri pangan olahan berbasis ikan dan hasil laut : abon, tepung ikan, surimi</li> <li>2. Industri pengeringan ikan dan biota perairan lainnya</li> <li>3. Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya</li> <li>4. Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya</li> <li>5. Industri pengolahan limbah ikan</li> <li>6. Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri pangan olahan berbasis ikan dan hasil laut : abon, tepung ikan, surimi</li> <li>2. Industri pengeringan ikan dan biota perairan lainnya</li> <li>3. Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya</li> <li>4. Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya</li> <li>5. Industri pengolahan limbah ikan</li> <li>6. Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya</li> <li>7. Industri minyak ikan</li> </ol>
2	Industri Pengolahan Lada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tepung lada</li> <li>2. Lada hijau kering → sebagai flavor dalam industri pengolahan daging serta aneka masakan berbahan daging dan industri saus</li> <li>3. Lada hijau kering beku → untuk produk sup instan, makanan kering dan keju</li> <li>4. Lada hijau beku → untuk salad segar dan makanan beku</li> <li>5. Lada hijau dalam larutan garam yang dikalengkan atau dibotolkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lada hitam untuk bahan baku obat (mengontrol lemak dalam darah; memberi efek anti kanker; antioksidan; mengatasi masalah pencernaan, penyakit asma dan saluran pernafasan)</li> <li>2. Balsam lada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minyak lada untuk flavor pada berbagai produk makanan, bahan obat, aromaterapi, dan beberapa jenis parfum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oleoresin sebagai bahan baku flavor; bahan pengawet alami; bahan baku obat &amp; farmasi, kosmetik, parfum, pengalengan daging, saos, minuman ringan, industri roti dan kembang gula</li> </ol>
3	Industri Pengolahan Sawit	<i>INDUSTRI OLEOFOOD</i>			
		Minyak Nabati Kasar (CPO, PKO, CNO), Olein, Minyak goreng	Stearin, Margarin, , asam organik,	Specialty fats (coco butter substitute, shortening,	Specialty fats aditif/penolong pengolahan pangan

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI			
		2019 -2039	2019 -2039	2019 -2039	2019 -2039
		curah, minyak goreng kemasan,		margarin), Tocopherol, Betacarotene	
		INDUSTRI OLEOKIMIA			
		Fatty acids	Fatty alcohols, Methyl ester sulfonat (biosurfactant),	Methyl esters, Bioplastics (PHB, PHV, polylactate) berbasis limbah PKS dan serat nabati	Fatty acids, Fatty alcohols, Fatty amine, Methyls esters, dan polymers turunan minyak sawit
		INDUSTRI BIOENERGI DAN KEMURGI			
		Arang aktif, biogas limbah cair untuk listrik	Biodisel, bioethanol, Bioetanol berbahan baku lignoselulosa dan limbah biomasa	Biomaterial untuk peralatan medis, <i>aromatic building blocks</i> berbasis lignin untuk sintesis obat/farmasi,	bioavtur (bio jet fuel) <i>Nano-cellulose derivatives, bio-based fiber&amp;polymers(carbon fiber, viscous), new generation of biobasedcomposit,</i>
4	Industri Pengolahan Timah (Hilirisasi timah) dan Mineral Ikutan Timah	Tin solder dan Konsentrat logam tanah jarang	Tin chemical dan Logam tanah jarang	Timah dan Logam tanah jarang untuk komponen elektronik	Logam tanah Bahan bakar nuklir

## b. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Provinsi

Sasaran dan program-program dari masing-masing industri unggulan di atas dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Industri Pengolahan Ikan

Sasaran dan program industri pengolahan hasil perikanan tahun 2019-2039 pada RPIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan potensi hasil perikanan, khususnya yang berasal dari hasil penangkapan laut. Namun demikian, pengembangan industri pengolahan ikan ke depan perlu mempertimbangkan perikanan budidaya.

Industri pengolahan hasil perikanan menempati prioritas pertama, dengan bobot terbesar (3,90) dalam pembangunan industri unggulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut sangat sesuai dengan kondisi geografis Provinsi yang dikelilingi oleh lautan dan selat sebesar 80% (65.502 km<sup>2</sup>) dengan panjang pantai 1.295,83 km. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) termasuk kategori WPP 711 Laut Cina Selatan yang potensinya mencapai 1.059.000 ton per tahun. Hal tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kelompok sumber daya ikan berdasarkan Keputusan tersebut mencakup ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang penaeid, ikan karang konsumsi, lobster, dan cumi-cumi.

Rancangan sasaran dan program industri pengolahan hasil perikanan disusun berdasarkan kondisi saat ini dari ketersediaan pasokan ikan, khususnya perikanan tangkap laut, nilai produksi, jumlah unit pengolahan ikan, tenaga kerja, ekspor, dan investasi. Masing-masing kondisi saat ini (*existing condition*) dibahas pada bagian berikut.

Produksi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata mengalami kenaikan 1,04% dari tahun 2012 – 2016. Total produksi perikanan tangkap tahun 2012 – 2016 mencapai 933.206,50 ton, dimana Kabupaten Belitung memberikan kontribusi terbesar (26,50%) pada periode tersebut. Pada tahun 2016, produksi perikanan tangkap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 188.572,60 ton atau meningkat 35,14% dibandingkan tahun 2015. Produksi perikanan tangkap tertinggi dihasilkan oleh Kabupaten Belitung dengan jumlah produksi 65.169,50 ton. Pada tahun 2016, jenis ikan yang paling banyak ditangkap adalah ikan tembang sebesar 25,114.2, kemudian ikan japuh sebesar 23.429,6 ton, Siro sebesar 10.963 ton, rajungan sebesar 10.420 ton dan tenggiri sebesar 7.273 ton. Produksi perikanan tangkap menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2012 – 2016 disajikan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 33 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 - 2016 (ton)

Tahun	Kab. Bangka	Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah	Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung	Kab. Belitung Timur	Kota Pangkalpinang	Total
2012	24.052,00	12.109,70	16.890,00	44.185,50	43.304,70	37.694,60	24.328,70	202.565,20
2013	25.034,70	11.098,80	17.559,10	44.975,30	44.947,40	37.482,10	18.144,00	199.241,40
2014	26.756,90	12.642,40	16.661,40	39.489,60	50.134,60	39.533,10	18.066,40	203.284,40
2015	6.322,30	14.113,50	18.843,90	18.269,60	43.738,10	36.423,60	1.832,00	139.542,90
2016	4.463,60	12.960,10	22.988,10	41.309,60	65.169,50	39.593,20	2.088,50	188.572,60
Total	86.629,50	62.924,50	92.942,50	188.229,60	247.294,30	190.726,60	64.459,60	933.206,50

Sumber: Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung dalam Angka 2017 (diolah)

Nilai produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 sebesar kurang lebih 4,2 triliun rupiah, dimana mengalami kenaikan sebesar 15,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata peningkatan nilai produksi perikanan tangkap selama tahun 2012 -2016 adalah 5,91%. Kabupaten Belitung Timur memberikan kontribusi terbesar (31,65%) dalam nilai produksi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun produksi perikanan tangkap terbesar berada di Kabupaten Belitung, namun nilai produksinya menempati urutan kedua setelah Kabupaten Belitung Timur yaitu 3,96 triliun Rupiah. Tabel berikut menyajikan nilai produksi perikanan tangkap berdasarkan Kabupaten/Kota selama tahun 2012-2016.

Tabel 34 Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2016 (ribu Rupiah)

Tahun	Kab. Bangka	Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah	Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung	Kab. Belitung Timur	Kota Pangkalpinang	Total
2012	479.890.252	174.201.761	264.287.950	524.073.189	716.813.923	863.371.283	504.172.100	3.526.810.458
2013	469.163.786	395.708.759	316.005.340	621.795.490	847.477.890	782.333.492	379.336.000	3.811.820.757
2014	502.739.242	433.569.500	318.997.090	1.091.073.403	900.029.468	853.598.400	378.190.200	4.478.197.302
2015	120.592.133	287.000.295	410.684.456	275.995.480	682.006.431	1.844.576.542	65.997.619	3.686.852.956
2016	98.571.650	239.308.723	505.415.259	633.568.570	815.289.003	1.913.544.882	61.209.914	4.266.908.000
	1.670.957.063	1.529.789.038	1.815.390.095	3.146.506.132	3.961.616.715	6.257.424.599	1.388.905.833	19.770.589.473

Sumber: Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung dalam angka 2017 (diolah)

Unit pengolahan hasil perikanan mengalami kecenderungan meningkat selama tahun 2012 sampai 2016 dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,64% pada periode tersebut. Namun demikian, jumlah unit pengolahan hasil perikanan pada tahun 2016 menurun sebesar 13,90% dari tahun 2015. Pada tahun 2015, jumlah unit pengolahan hasil perikanan adalah 2.130 unit, sedangkan tahun 2016

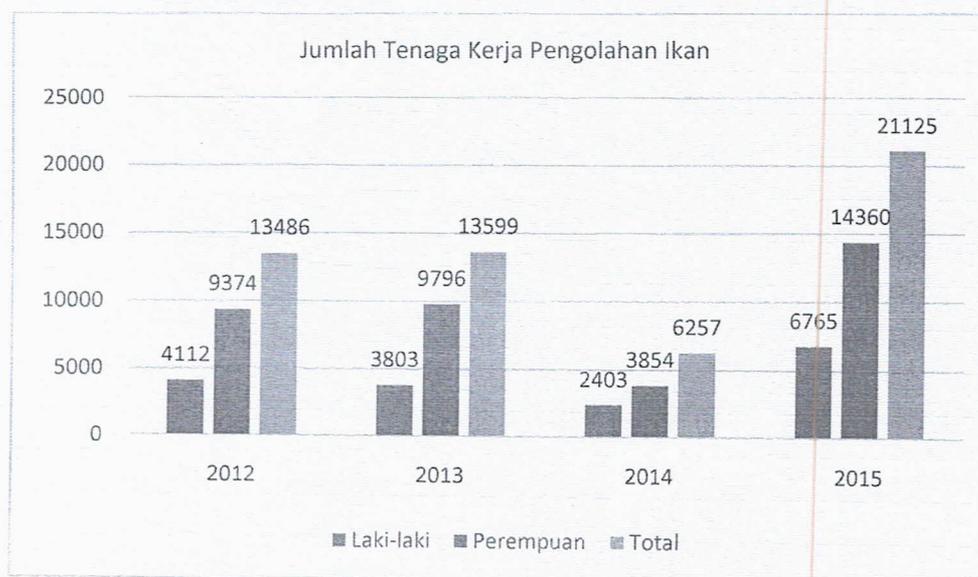
menurun menjadi 1.834 unit. Gambar berikut menyajikan jumlah unit pengolahan pada tahun 2012 sampai dengan 2016.



Sumber: Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung dalam angka 2017

Gambar 9 Unit Pengolahan Hasil Perikanan tahun 2012-2016

Pengolahan hasil perikanan mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak. Pada tahun 2015, jumlah tenaga kerja yang terserap pada bidang ini adalah 21.125 orang yang terdiri dari 6.765 laki-laki dan 14.360 perempuan. Rata-rata peningkatan jumlah tenaga kerja pengolahan ikan pada tahun 2012 sampai dengan 2015 adalah 6,15%. Tenaga kerja perempuan lebih banyak terserap (67,78%) pada pengolahan hasil perikanan dibandingkan dengan laki-laki. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada pengolahan ikan disajikan pada gambar berikut.



Gambar 10 Jumlah Tenaga Kerja Pengolahan Ikan tahun 2012-2015

Saat ini perusahaan besar dan menengah yang berbasis hasil perikanan jumlahnya 14 perusahaan, yang berlokasi di Pulau Belitung dan Bangka. Hampir semua perusahaan melakukan pembekuan ikan. Jumlah tenaga kerja maksimum di perusahaan adalah 137 dan minimum 20 orang. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri besar dan sedang yang mengolah hasil perikanan sejumlah 786 orang. Perusahaan pembekuan dan pengolahan ikan disertai jumlah tenaga kerja pada tahun 2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 35 Perusahaan Industri Pembekuan dan Pengolahan Ikan dan Biota Lainnya Tahun 2017

No	Nama Perusahaan	Produksi utama	Jumlah Tenaga Kerja
1	PT Nelayan Mitra Mandiri	Ikan dan cumi olahan	20
2	PT Serikat Sindo Makmur	Ikan beku	25
3	PT Eka Lancar Mandiri	Ikan beku	28
4	PT Sanjaya Fisherindo	Penanganan produk segar ikan	81
5	CV Wadah Lautan Makmur	Daging ikan beku	35
6	CV Laut Jawa	Fillet ikan	44
7	Duta Buana Pasifik	Daging ikan beku	23
8	CV Sanjaya Fishery	Daging ikan beku	137
9	Miniplan Rajungan Supianidi	Daging rajungan	25
10	PT Prayasa Minatirta	Pembekuan udang	110
11	Cahaya Bahari Belitung	Cumi beku	28
12	PT Cahaya Bintang Laut Abadi	Ikan beku	70
13	Surya Hasil Laut	Ikan beku dan fillet ikan	80
14	CV Surya Sepakat Pulau Bangka	Ikan dan hasil laut beku	80
<b>Total</b>			<b>786</b>

Sumber: Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017)

Industri pengolahan ikan dirancang berdasarkan cakupan industri ikan berdasarkan 6 (enam) kelompok seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel 36 Kelompok industri pengolahan ikan diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi Kelompok Usaha Indonesia (KLUI)

KLUI 5 digit	Uraian
31141	Industri Pengalengan ikan dan biota perairan lainnya, seperti ikan sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng dan sejenisnya
31142	Industri penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya seperti ikan tembang asin, ikan teri asin, udang asin, sumi-cumi asin dan sejenisnya
31143	Industri pengasapanikan dan biota perairan lainnya seperti ikan bandeng asap, ikan cakalng asap dan sejenisnya
31144	Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya seperti ikan bandeng beku, ikan tuna beku, dan sejenisnya
31145	Industri pemindangan ikan dan biota perairan lainnya, pindang ikan bandeng, pindang ikan tongkol, dan sejenisnya
31149	Industri pengolahan pengawetan lainnya untuk ikan dan biota lainnya:tepung ikan, tepung udang, rumput laut, terasi, petis dan sejenisnya

Selain itu, pembangunan industri pengolahan hasil perikanan direncanakan berdasarkan pohon industri pengolahan hasil laut yang disusun oleh Kementerian Perindustrian. Jenis industri pengolahan hasil perikanan selama periode tahun 2019 -2039 disusun berdasarkan kondisi saat ini dan industri yang diperlukan dengan mengacu pada pohon industri. Selain itu, industri yang perlu dikembangkan ke depan adalah industri *Alkali Treated Cottonii* (ATC) dan *Semi-Refined Carrageenan* (SRC) dengan bahan baku berasal dari rumput laut. Jenis industri pengolahan hasil perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersaji pada tabel berikut.

Tabel 37 Jenis Industri Pengolahan Hasil Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 -2039

No	2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
1	Industri pangan olahan berbasis ikan dan hasil laut: abon, tepung ikan, surimi	Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya	Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya	Industri minyak ikan
2	Industri pengeringan ikan dan biota perairan lainnya	Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya	Industri pengolahan limbah ikan	Industri Alkali Treated Cottonii (ATC) dan Semi-refined carrageenan

Berdasarkan tabel tersebut, setiap lima tahun ada penambahan industri yang harus menghasilkan nilai tambah. Pada Tahun 2019-2024, industri yang dibangun adalah industri pangan olahan seperti abon, tepung ikan dan surimi, dan industri pengeringan ikan. Pada periode selanjutnya, industri tersebut harus mampu menghasilkan produk yang lebih bernilai tambah, yaitu adanya diversifikasi produk dan bentuk kemasan yang sesuai dengan keinginan pasar. Contohnya pengolahan abon yang semula hanya dikemas dengan plastik, maka pada periode selanjutnya kemasan menggunakan dus dan sudah memiliki merek.

Pembangunan industri pengolahan hasil perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu bersinergi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.3 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Sasaran pembangunan industri pengolahan hasil ikan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 38 Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Ikan Tahun 2019 – 2039 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Sasaran	Tahun			
		2024	2029	2034	2039
1	Nilai tambah (Rp milyar)	30	32	34	36
2	Pertumbuhan (%)	8	9	10	12
3	Nilai ekspor (Juta Rupiah)	4.500.000	4.750.000	5.000.000	10.000.000
4	Penyerapan tenaga kerja (orang)	25.000	26.000	27.000	28.000

No	Sasaran	Tahun			
		2024	2029	2034	2039
5	Nilai Investasi (Rp milyar)	200	300	400	500

Pembangunan industri pengolahan hasil perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu bersinergi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.3 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Tabel 39 Program Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2019 – 2039

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2019 - 2024	2024- 2029	2029- 2034	2034- 2039
<b>I. Program Pengembangan SDM Hasil Laut dan Perikanan</b>								
A	Peningkatan kemampuan SDM Perikanan							
1	Training/ diklat intensifikasi Hasil Laut dan Perikanan	Dis KP	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	√	√
2	Workshop/ short course standar pasca panen	Dis KP	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	√	√
B	Peningkatan kemampuan SDM industri Hasil Laut dan Perikanan							
1	Workshop/ short course Quality Control (QC), pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	Disperindag	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	√	√
2	Pendidikan industri Hasil Laut dan Perikanan bagi aparat daerah/ Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri Hasil Laut dan Perikanan	Disperindag	Pelaku Usaha Hasil Laut dan Perikanan Perguruan Tinggi		√	√	√	√
3	Membangun/mendirikan Sekolah Kejuruan/Diploma Jurusan Khusus Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan	Disperindag, Dinas Pendidikan	Perguruan Tinggi		√	√		
<b>II. Program Peningkatan Kapasitas Produksi dan Nilai Tambah</b>								
A	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku hasil laut dan perikanan dengan dukungan untuk peningkatan produktifitas dan ekstensi yang berwawasan lingkungan							
1	Intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi Budi daya Perikanan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Dis KP	Pelaku Usaha Perikanan	SMK, SMTI, POLNEP / Perguruan Tinggi	√	√		√
2	Fasilitasi, benih yang berkualitas	Dis KP	Pelaku Usaha Perikanan		√			
3	Peningkatan nilai tambah hasil perikanan yang berdaya saing	Dis KP, Disperindag, Dis KopUKM	Pelaku Usaha Perikanan	Perbankan	√	√	√	√
	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial)	Disperindag	Pelaku Usaha Perikanan		√	√		

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2019 - 2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
	Fasilitasi system rantai dingin ikan	Disperindag			√	√		
<b>B</b>	<b>Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri</b>							
1	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	Dis KP	Pelaku Usaha Perikanan	SMK, SMTI, POLNEP/ Perguruan Tinggi	√	√	√	√
2	Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	Disperindag, Dis KP	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	√	
3	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	Disperindag	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	√	√
4	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri hilir kelapa)	Disperindag	Pelaku Usaha Perikanan	Balitbangda, Baristand, Perguruan Linggi	√	√	√	√
<b>III. Program Pengembangan Pasar</b>								
1	Perluasan akses pasar	Disperindag	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	√	√
2	Membangun merk industri pengolahan ikan				√	√	√	
3	Promosi industri hasil olahan perikanan secara offline dan online	Disperindag	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	√	√
<b>IV. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan</b>								
1	Fasilitasi, promosi dan insentif investasi (khususnya untuk industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan)	BPMPTSP, Disperindag	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga financial/ bank	Disperindag	Pelaku Usaha Perikanan	Perbankan, Lembaga non bank	√	√	√	√
3	Bimbingan dan pengawasan manajemen finansial	Disperindag Dinas Koperasi dan UKM	IKM	Perbankan, Lembaga non bank	√	√		
<b>V. Program-program Dukungan Lainnya/ Insentif untuk Pengembangan Industri Hasil Laut dan Perikanan</b>								
A	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	Bappeda, Dinas PU, Dishub, DKP			√	√	√	

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2019 - 2024	2024- 2029	2029- 2034	2034- 2039
		BLHD, PLN, PDAM, dll.						
B	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait; Kerjasama riset maupun special study dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan Hasil Laut dan Perikanan)	Bappeda, Disperindag		Do-nor	√	√	√	√
C	Program Pengembangan Perwilyahan Industri (WPPI, KPI, KI, Sentra IKM) khususnya KI	Bappeda, Dinas PU, Disperindag	Industri (Investor)		√	√		

## 2. Industri Pengolahan Lada

Luas areal dan produksi lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati jumlah tertinggi di Indonesia, seperti terlihat dari data Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Lada tahun 2015-2017. Selain itu, tingkat produktivitasnya menempati tingkat kedua tertinggi di Indonesia setelah Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki jumlah petani lada kedua terbanyak di Indonesia setelah Provinsi Lampung. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 40 Luas Areal, Produksi dan Jumlah Petani Lada 2015 – 2017

Tahun	Daerah	Luas Areal		Produksi		Produk-tivitas	Jumlah Petani	
		Ha	%	Ton	%	Kg/Ha	KK	%
2015	Kep. Bangka Belitung	48.011	28,65	31.408	38,54	1.259	56.940	20,81
	Indonesia	167.590	100	81.501	100	828	273.556	100
2016*	Kep. Bangka Belitung	48.408	28,8	31.896	38,82	1.277	57.411	20,96
	Indonesia	168.080	100	82.167	100	833	273.911	100
2017**	Kep. Bangka Belitung	48.695	29,05	32.352	38,99	1.282	57.751	21,12
	Indonesia	167.626	100	82.964	100	837	273.421	100

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Lada tahun 2015-2017 (Diolah)

Keterangan : \* Angka Sementara

\*\* Angka Estimasi

Luas areal, produksi, produktivitas, dan jumlah petani lada perkebunan rakyat yang dihasilkan setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 41 Luas Areal, Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Lada per Kabupaten Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (KK)
1.	Kab. Bangka	4.715	3.359	1.372	8.016
2.	Kab. Bangka Tengah	2.963	1.900	1.413	4.299
3.	Kab. Bangka Selatan	23.368	15.711	1.291	22.679
4.	Kab. Bangka Barat	5.404	4.413	1.392	8.920

5.	Kab. Belitung	7.976	4.213	1.161	8.708
6.	Kab. Belitung Timur	3.584	1.812	834	4.318
7.	Kota Pangkal Pinang	-	-	-	-

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Lada tahun 2015-2017

Dengan potensi produk lada yang tinggi tersebut, baik dari luas areal, produksi, produktivitas, dan jumlah petani, tentunya akan menambah nilai produk lada secara signifikan apabila produk lada dikembangkan lebih lanjut menjadi produk yang lebih bernilai jual tinggi. Saat ini produk lada yang dijual dan diekspor masih sebagai produk primer berbentuk butiran utuh dalam bentuk curah (Risfaheri, 2012). Pada umumnya, petani langsung mengeringkan lada dengan cara menjemur sehingga menghasilkan lada hitam. Selain itu, petani juga melakukan perendaman dan pembersihan sebelum pengeringan, yang akan menghasilkan lada putih. Kalaupun dilakukan pengolahan, masih berbentuk bubuk lada saja.

Total produksi lada Indonesia yang diekspor kurang lebih sebanyak 85% (Badan Diklat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016). Artinya, mayoritas produksi lada yang dihasilkan oleh petani Indonesia adalah untuk ekspor. Hanya sedikit dari produksi tersebut yang digunakan untuk konsumsi dalam negeri. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung, pada tahun 2017 menunjukkan terdapat 9 (Sembilan) perusahaan eksportir lada yang mengekspor lada ke Singapura, Jerman, Malaysia, Vietnam, Taiwan, Spanyol, Jepang, Belanda, India, dan Perancis, dengan nilai ekspor sebesar US\$ 43.260.983 pada tahun 2015 dan US\$ 36.311.580 pada tahun 2016. Hasil pengolahan lada yang dapat dilakukan saat ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu lada hitam, lada putih, dan lada hijau. Dari ketiga jenis tersebut, pengolahan lada yang dikenal luas adalah lada hitam dan lada putih. Lada putih dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal dengan sebutan *Muntok White Pepper*, karena pertama kali diekspor melalui pelabuhan Muntok di Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan di Bangka sendiri lada putih dikenal dengan sebutan "sahang" ([www.sumber.com/edukasi](http://www.sumber.com/edukasi), 2017).

Sampai dengan saat ini, data yang menunjukkan jumlah perusahaan yang mengolah lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum ditemukan. Hal ini terjadi karena pada umumnya petani langsung mengolah buah lada tersebut menjadi lada hitam atau lada putih. Padahal luas areal dan jumlah produksi lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbesar di Indonesia dapat menjadi keunggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan dapat meningkatkan nilai tambah yang tinggi apabila lada tersebut diolah lebih lanjut menjadi produk yang lebih bernilai jual. Rantai pemasaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 60% adalah dari petani ke pedagang desa, dari pedagang desa ke pedagang kabupaten, dari pedagang kabupaten ke pedagang provinsi atau eksportir (Kemala, 2006).

Permintaan produk turunan lada dari pasar luar negeri sangat tinggi, karena tidak banyak negara yang menghasilkan rempah-rempah seperti Indonesia. Negara-negara pengimpor produk turunan lada diantaranya adalah Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, dan beberapa negara di Timur Tengah (Risfaheri, 2012). Hal ini dapat menjadi potensi yang sangat luar biasa untuk daerah penghasil lada, dalam hal ini adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, pembangunan industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berbasis komoditas lada dapat diarahkan pada jenis industri yang laku dalam perdagangan internasional yaitu:

- a) Tepung lada;

- b) Lada hijau kering (*dehydrated green pepper*) → dapat digunakan sebagai flavor dalam industri pengolahan daging serta aneka masakan berbahan daging dan industri saus;
- c) Lada hijau kering beku (*freeze-dried green pepper*) → dapat digunakan dalam produk sup instan, makanan kering dan keju;
- d) Lada hijau beku (*freeze green pepper*) → dapat digunakan dalam salad segar dan makanan beku;
- e) Lada hijau dalam larutan garam yang dikalengkan atau dibotolkan (*canned green pepper*);
- f) Lada hitam sebagai bahan baku obat (mengontrol lemak dalam darah; memberi efek anti kanker; antioksidan; mengatasi masalah pencernaan, penyakit asma dan saluran pernafasan);
- g) Balsam lada;
- h) Minyak lada untuk flavor pada berbagai produk makanan, bahan obat, aromaterapi, dan beberapa jenis parfum; dan
- i) Oleoresin sebagai bahan baku flavor; bahan pengawet alami; bahan baku obat dan farmasi, kosmetik, parfum, pengalengan daging, saos, minuman ringan, industri roti, dan kembang gula.

Industri-industri pengolahan lada yang disebutkan di atas ada yang dapat dilaksanakan pada agroindustri perdesaan dan industri kecil karena teknologinya sederhana dan biaya investasinya rendah, namun ada juga yang hanya mungkin diterapkan pada industri skala menengah dan skala besar karena menggunakan teknologi yang tinggi/rumit dan biaya investasinya besar. Pengolahan lada yang dapat diterapkan pada agroindustri perdesaan dan industri kecil adalah sterilisasi lada dengan air panas/uap dan microwave, pengolahan tepung lada, dan pengolahan lada hijau kering. Pengolahan lada yang dapat diterapkan pada industri skala kecil dan menengah adalah pengolahan lada hijau dalam larutan garam. Sedangkan pengolahan lada yang dapat diterapkan pada industri skala menengah dan skala besar adalah sterilisasi lada dengan teknologi iradiasi, pengolahan lada hijau kering beku, ekstraksi minyak lada, dan oleoresin.

Untuk mengimplementasikan hilirisasi produk lada tersebut, diperlukan sasaran pembangunan industri yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait. Sasaran pembangunan industri untuk produk-produk pengolahan lada untuk 20 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 42 Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Lada Tahun 2019 – 2039

No	Sasaran	Tahun			
		2024	2029	2034	2039
1	Nilai tambah (Rp milyar)	702	971	3.585	3.860
2	Pertumbuhan (%)	7,5	7,5	7,5	7,5
3	Nilai ekspor (Juta US\$)	61	85	280	302
4	Penyerapan tenaga kerja (orang)	2.975	3.050	3.126	3.204
5	Nilai Investasi (Rp milyar)	200	255	250	250

Berdasarkan data dari Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Lada 2015-2017 (diolah), pertumbuhan produksi lada pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 1,55% dan 1,43%. Dengan demikian diasumsikan bahwa

rata-rata pertumbuhan produksi lada adalah 1,5% per tahun. Jadi pertumbuhan produksi lada untuk setiap lima tahun adalah 7,5 %.

Selama ini ekspor lada yang dilakukan oleh eksportir dari Bangka Belitung masih sebatas pada produk lada putih dan lada hitam dalam bentuk butiran utuh atau bubuk. Untuk meningkatkan nilai jual, lada tersebut dapat diolah menjadi beberapa produk turunan dari lada seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan memperhitungkan penjualan produk olahan lada ke dalam nilai ekspor, yaitu produk lada hijau pada tahun 2019-2024, ditambah produk lada hitam sebagai bahan baku obat dan balsam lada pada tahun 2024-2029, serta ditambah produk minyak lada pada tahun 2029-2034, dan oleoresin pada tahun 2034-2039, maka nilai ekspor produk pengolahan lada menjadi jauh lebih tinggi.

Produk olahan lada memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lada putih atau lada hitam hasil pengeringan oleh petani. Sebagai perbandingan, harga jual lada hitam dan lada putih adalah sekitar 5-7 US\$/kg, sedangkan harga jual lada hijau kering adalah 40,56 US\$/kg, harga jual lada hijau kering beku adalah 18,99 US\$/120 gr, harga jual lada hijau dalam larutan garam adalah 30,9 US\$ per kemasan 595 gr atau 16,81 US\$ per kemasan botol 638 gr, harga jual minyak lada adalah 322,51 US\$/kg, serta harga jual oleoresin adalah 53,33 US\$/lt (Risfaheri, 2012). Dengan demikian, dengan adanya pengolahan industri untuk komoditi lada, akan memberikan nilai tambah yang cukup besar dan signifikan.

Dampak dari adanya industri pengolahan untuk komoditi lada selain terhadap peningkatan nilai ekspor dan nilai tambah produk adalah adanya penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Pengolahan lada menjadi produk lada hijau dapat dilakukan di tingkat petani maupun industri kecil dan menengah karena teknologinya yang relatif tidak terlalu rumit. Sedangkan ekstraksi minyak lada dan oleoresin dapat dilakukan pada industri menengah dan besar. Dengan adanya industri pengolahan lada tersebut, dapat menyerap tambahan tenaga kerja baru yang diasumsikan 5 % dari jumlah petani lada yang ada, dengan mempertimbangkan juga pertumbuhan produksi lada. Jumlah tersebut dapat menyerap sekitar 16% - 17,5% dari jumlah pengangguran terbuka (dengan basis data angkatan kerja pada tahun 2016).

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri di atas, maka diperlukan program-program yang dapat mendukung tercapainya sasaran tersebut. Oleh karena itu ditetapkan program pendukung yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 43 Program Pengembangan Industri Pengolahan Lada Tahun 2019 – 2039

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
<b>I. Program Pengembangan SDM</b>								
A	Peningkatan kemampuan SDM petani lada							
1	Pendidikan dan pelatihan tentang intensifikasi tanaman lada	Disbun	Petani lada	KIMBUN (Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan), KUAT (Kelembagaan Usaha Agribisnis Terpadu), APLI (Asosiasi petani lada Indonesia)	√			
2	Pembinaan dalam bentuk	Disbun,	Petani	KIMBUN	√			

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
	Workshop/ short course standar pasca panen lada	Disperindag	lada	KUAT, APLI				
B	Peningkatan kemampuan SDM industri lada							
1	Workshop/short course, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri tentang teknologi pengolahan lada dan pengawasan mutunya	Disperindag	Industri lada	KIMBUN KUAT	√	√	√	√
2	Pendidikan industri lada bagi aparat daerah/ Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri lada	Disperindag, Penyuluh perkebunan		KIMBUN KUAT, APLI	√	√		
3	Mendirikan Sekolah/pusat pelatihan untuk bidang Teknologi Pengolahan Lada	Disperindag, Dinas Pendidikan		SMK, SMTI	√	√		
<b>II. Program Produksi dan Operasional Lada</b>								
A	Peningkatan produktifitas lada							
1	Intensifikasi dan ekstensi perkebunan lada (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Disbun	Petani lada	KUD, KIMBUN KUAT, APLI	√			
2	Fasilitasi ketersediaan dan kontinuitas bibit unggul dan pupuk (pendirian industri pembibitan lada dan industri kompos)	Disbun	Petani lada	UPBS (Unit Pengelolaa n Benih Sumber) UKT (Unit Komersialis asi Teknologi)	√			
3	Pengendalian hama dan penyakit dengan menerapkan paket pengendalian terpadu	Disbun	Petani lada	KUD, KIMBUN KUAT, APLI	√	√	√	√
4	Penumbuhan pusat agribisnis lada			KUD, KIMBUN KUAT, APLI	√	√		
B	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri							
1	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen lada	Disbun, Disperindag	Petani lada	KIMBUN KUAT, APLI	√	√		
2	Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen lada	Disbun	Petani lada	KUD, KIMBUN KUAT, APLI	√	√		
3	Peningkatan kualitas dari standar kadar air, kebersihan, keutuhan dan kemurnian lada	Disbun	Petani lada	KUD, KIMBUN KUAT, APLI	√	√	√	√
<b>III. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Lada</b>								
1	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/HACCP atau standar lainnya yang relevan)	Disperindag	Industri lada	KIMBUN KUAT	√	√	√	√
2	Fasilitasi alat-alat pengolahan lada secara mekanis seperti alat pengupas, alat perontok, alat pengering dan alat penyuling minyak	Disperindag	Industri lada	KIMBUN KUAT	√	√	√	
3	Kerjasama Riset dan	Disperindag	Industri	PUSLIT	√	√		

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
	Pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri hilir lada)	dag	lada, Investor	LADA, SMK, SMTI, BPPT				
<b>IV. Program Pemasaran dan Perdagangan Lada</b>								
1	Optimalisasi media informasi berbasis online maupun konvensional secara profesional sebagai sarana pemasaran	Disperin dag, Diskominfo	Industri lada	KUD, KIMBUN KUAT, APLI	√	√	√	√
2	Kerjasama dengan instansi terkait untuk pengembangan produk dan pasar	Disperin dag	Petani lada, Industri lada	KIMBUN KUAT, APLI PUSLT LADA, BPPT	√	√	√	√
3	Peningkatan intensitas informasi pasar melalui media yang dapat menjangkau petani	Disperin dag, Diskominfo	Petani lada, Industri lada	KIMBUN KUAT, APLI	√	√		
4	Efisiensi pemasaran dengan menekan biaya tataniaga	Disperin dag,	Petani lada, Industri lada	KIMBUN KUAT, APLI	√	√	√	√
5	Promosi pasar untuk ekspor melalui IPC (International Pepper Community) dan Badan Pengembangan Ekspor	Disperin dag,	Petani lada, Industri lada	KIMBUN KUAT, APLI, IPC dan Badan Pengembangan Ekspor	√	√	√	√
<b>V. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan</b>								
1	Fasilitasi dan promosi dan insentif investasi lada (khususnya untuk industri hilir)	DPMPTSP, Disperin dag	Industri lada, Investor		√	√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/bank	Disperin dag	Industri lada, Perbankan/lembaga keuangan		√	√	√	√
3	Bimbingan manajemen keuangan	Disperin dag	Industri lada, konsultan manajemen		√	√	√	
<b>VI. Program-program Pendukung Lainnya</b>								
1	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	BAPEDA, DIS-PU, DIS TAMBE N, BLHD, PLN, PDAM			√	√		
2	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah; Kerjasama riset dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan lada)	BAPPEDA, Disperin dag	Industri lada, IKM	Penyedia dana riset	√	√	√	
3	Program Pengembangan Perwilayahan Industri	BAPPEDA, Dinas	Industri lada,		√	√		

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
		PU, Disperindag	investor					
4	Program Pemberdayaan IKM	Disperindag	IKM		√	√		
5	Program Perijinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri hilir lada)	DPMPTSP, Disperindag			√	√		

### 3. Industri Pengolahan Sawit

Industri pengolahan sawit di Bangka Belitung hingga tahun 2017 tercatat berjumlah 17 perusahaan yang secara umum memproduksi *Crude Palm Oil* (CPO). Perusahaan yang telah mengolah CPO menjadi minyak goreng hanya ada 1 (satu) perusahaan berlokasi di Kabupaten Belitung Timur dengan kapasitas 10.000 ton per bulan dan orientasi pasar ekspor ke Asia Selatan, Asia Timur serta Asia Tenggara. Sementara itu kapasitas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang memproduksi CPO bervariasi dari 30 ton/ jam hingga 100 ton/ jam. Pada tahun 2015 total kapasitas dari seluruh PKS di Bangka Belitung mencapai 798 ton/ jam. Perkebunan besar terdapat 41 buah dan perkebunan rakyat seluas 63.212 ha (BPS 2016) yang memasok kebutuhan bahan baku industri CPO dan hilir berikutnya. Dari perkebunan rakyatnya saja produksi kelapa sawit (tandan buah segar) mencapai 107.000 ton pada tahun 2015 dan meningkat sekitar 4% per tahun. Pembangunan industri berbasis komoditas sawit diarahkan pada jenis industri:

- a) *Oleofood*;
- b) *Oleochemical*; dan
- c) Bioenergi dan Kemurgi (bio diesel).

Sasaran dan program pembangunan industri berbasis komoditas sawit adalah sebagai berikut.

Tabel 44 Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Sawit Tahun 2019 – 2039

No	Sasaran	Tahun			
		2024	2029	2034	2039
1	Nilai tambah (Rp milyar)	300	385	500	700
2	Pertumbuhan (%)	4	5	6	4
3	Nilai ekspor (Rp milyar)	250	350	500	600
4	Penyerapan tenaga kerja (orang)	11350	12485	14982	16480
5	Nilai Investasi akumulatif (Rp milyar) [termasuk perkebunan sawit]	300	400	800	1000

Dalam beberapa tahun kedepan, kontribusi pertumbuhan industri sawit diperkirakan masih akan bergerak lebih besar. Pertumbuhan industri akan diarahkan pada hilirisasi secara bertahap dari pabrik minyak goreng curah yang ada pada saat ini (*baseline*) menjadi minyak goreng kemasan, kemudian produk turunan lainnya. Pertumbuhan lebih disebabkan program intensifikasi dan diversifikasi produk hilir. Perluasan atau ekspansi lahan untuk kelapa sawit secara masif dalam jangka panjang kurang memungkinkan karena keterbatasan luas daratan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, intensifikasi dan peremajaan kebun-kebun sawit tua menjadi prioritas utama untuk menjamin keberlanjutan dan kecukupan pasokan bahan baku industri.

Adapun pengembangan industri hilir kelapa sawit dalam 20 tahun ke depan, direncanakan mengikuti tahapan sebagai berikut.

Tabel 45 Tahapan pengembangan industri kelapa sawit (2019 – 2039)

2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
<i>INDUSTRI OLEOFOOD</i>			
Minyak Nabati Kasar (CPO, PKO, CNO), Olein, Minyak goreng curah, minyak goreng kemasan,	Stearin, Margarin, asam organik,	Specialty fats (coco butter substitute, shortening, margarin), Tocopherol, Betacarotene	Specialty fats aditif/penolong pengolahan pangan
<i>INDUSTRI OLEOKIMIA</i>			
Fetty acid	Fatty alcohols, Methyl ester sulfonat (biosurfactant),	Methyl esters, Bioplastics (PHB, PHV, polylactate) berbasis limbah PKS dan serat nabati	Fatty acids, Fatty alcohols, Fatty amine, Methyls esters, dan polymers turunan minyak sawit
<i>INDUSTRI BIOENERGI DAN KEMURGI</i>			
1. Arang aktif, biogas limbah cair untuk listrik	Biodisel, bioethanol, Bioetanol berbahan baku lignoselulosa dan limbah biomasa	Biomaterial untuk peralatan medis, <i>aromatic building blocks</i> berbasis lignin untuk sintesis obat/farmasi,	bioavtur (bio jet fuel) <i>Nano-cellulose derivatives, bio-based fiber&amp;polymers(carbon fiber, viscous), new generation of biobasedcomposit,</i>

Dilihat dari kemampuan pasokan bahan baku, pada tahun 2015 terdapat 41 perusahaan perkebunan besar kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Bangka memiliki jumlah perusahaan perkebunan besar terbanyak, yakni 9 perusahaan. Sementara itu, perkebunan sawit rakyat secara total di provinsi ini mampu memasok hingga 107.000 ton pada tahun 2015 (BPS 2017). Produksi terbesar disumbang oleh Kabupaten Bangka Barat (32.000 ton), disusul oleh Kabupaten Bangka (31.000 ton). Sedangkan dari sisi luas perkebunan sawit rakyat, Kabupaten Bangka Selatan menempati urutan pertama (20.415 ha), disusul Kabupaten Bangka Barat (17590 ha).

Mempertimbangkan kemampuan pasokan bahan baku di atas dan kemajuan yang sudah dicapai daerah dalam mengolah industri turunan, industri pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya secara utama akan didorong untuk dikembangkan di Kabupaten Bangka Barat, Bangka dan Belitung Timur. Pertimbangan di Kabupaten Bangka adalah (1) produksi kelapa sawit perkebunan rakyat terbesar, yakni 32.000 ton untuk menjamin kepastian keberlanjutan pasokan (2) produktivitas tertinggi 4 ton/ ha/ tahun, dan (3) posisinya yang strategis karena kedekatan akses dengan ibu kota Pangkal Pinang, dan pelabuhan serta berdekatan dengan Bangka Barat yang juga produsen kelapa sawit terbesar. Sedangkan di Belitung Timur, pertimbangannya antara lain: (1) keberadaan perusahaan yang telah mengembangkan industri minyak goreng berskala besar (10.000 ton per bulan), (2) potensi pengembangan menjadi industri minyak goreng kemasan, (3) mewakili sentral kelapa sawit di Pulau Belitung. Untuk mencapai sasaran di atas, maka ditetapkan program pendukun yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 47 Program Pengembangan Industri Pengolahan Sawit Tahun 2019 – 2039

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
<b>I. Program Pengembangan SDM Sawit</b>								
A	Peningkatan kemampuan SDM petani sawit							
	Pelatihan Good Agricultural Practices (GAP)	Disbun	Petani sawit		√	√		
2	Sosialisasi standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk petani	Disbun, Disperin	Petani sawit		√	√		
B	Peningkatan kemampuan SDM industri pengolahan sawit							
1	Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industry	Disperin	Industri sawit		√	√		
2	Pendidikan industri sawit bagi aparat daerah atau Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industry	Disperin			√	√		V
3	Membangun/mendirikan Sekolah Kejuruan/Diploma Jurusan Khusus Kelapa Sawit	Disperin, Dinas Pendidikan		SMK, Politeknik	√	√		
<b>II. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Sawit</b>								
A	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku sawit dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas) dan peremajaan yang berwawasan lingkungan							
1	Intensifikasi dan peremajaan perkebunan sawit (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Disbun	Petani sawit	SMK, Perguruan Tinggi	√	√		
2	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	Disbun	Petani sawit	Asosiasi	√			
B	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industry							
1	Penyuluhan/ pelatihan panen sawit yang baik	Disbun	Petani sawit	SMK, Perguruan Tinggi	√	√		√
<b>III. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Sawit</b>								
1	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	Disperin	Industri sawit		√	√	√	√
2	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri hilir sawit)	Disperin	Industri sawit, Investor	PPKS, BPPT, Perguruan Tinggi	√	√		√
<b>IV. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Sawit</b>								
1	Pengembangan 'branded' produk sawit	Disperin	Industri sawit	Asosiasi	√	√		
<b>V. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan</b>								
1	Fasilitasi, promosi dan insentif investasi (khususnya untuk industri hilir sawit;	BKPMP, Disperind	Industri sawit, Investor		√	√		√

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
	margarine, minyak goreng dan oleochemical)							
<b>VI. Program-program Dukungan Lainnya/ Insentif untuk Pengembangan Industri Sawit</b>								
A	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	Bappeda, Dinas PU, PLN, Dishub, Distamben, PLN, PDAM, dll.			√	√		√
B	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait; Kerjasama riset maupun special study dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan sawit)	Bappeda, Disperin	Industri sawit, IKM	Donor	√	√		√
E	Program Perijinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri hilir sawit)	Disperin			√	√		√

#### 4. Industri Pengolahan Timah (Hilirisasi Timah) dan Bahan Mineral Ikutan

Dari sejumlah pulau penghasil timah di Indonesia, Pulau Bangka merupakan pulau penghasil timah terbesar. Dari keseluruhan Pulau Bangka, seluas 27,56 % daratan pulaunya merupakan area Kuasa Penambangan (KP) timah. Perusahaan penambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini terdiri dari tiga kelompok besar, yaitu PT Timah Tbk, PT Koba Tin, dan perusahaan lain. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki ijin untuk mengelola tambang pada suatu kawasan tertentu (kuasa penambangan), baik di darat maupun di laut. PT Timah Tbk mempunyai kuasa penambangan terluas, dan mempunyai ijin penambangan (Kontrak Karya) berlaku sampai tahun 2025. Sedangkan PT Koba Tin- Joint Venture Malaysia dan Indonesia, mempunyai KP terluas kedua mempunyai ijin penambangan hingga tahun 2013.

Sampai tahun 2016, nilai ekspor timah masih sangat menjanjikan bagi perekonomian provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Total ekspor timah dari kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana terlihat pada tabel, adalah sebesar 963.83 juta US\$ atau hampir 75% dari total ekspor kepulauan Bangka Belitung. Angka ini jauh melampaui ekspor non timah, yang hanya sebesar 25% dari total ekspor kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 46 Perkembangan Ekspor Timah dan Nontimah Kepulauan Bangka Belitung, 2016 (juta US\$)

Bulan	Timah	Non Timah	Total
Januari	33,02	24,53	57,55
Februari	45,42	22,47	67,89
Maret	35,79	19,09	54,89
April	98,46	22,9	121,36
Mei	58,28	24,5	82,78

Juni	117,24	26,04	143,28
Juli	40,2	22,32	62,51
Agustus	77,58	32,55	110,14
September	152,37	29,56	181,93
Otober	105,13	28,46	133,58
November	73,72	30,98	104,71
Desember	126,62	43,43	170,05
Total	963,83	326,83	1.290,67

Sumber: BPS 2017

Meski Timah masih menjadi penyumbang ekonomi terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun hasil penambangan dan pengolahan timah dianggap belum cukup mampu mensejahterakan masyarakat kepulauan Bangka Belitung. Industri pengolahan timah (hilirisasi timah) seperti industri tin solder, tin chemical dan industri terkait lainnya menjadi prioritas pengembangn kedepan. Industri timah sendiri dianggap sudah cukup mapan dan tidak memerlukan lagi aturan atau insentif untuk pengembangannya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagai daerah penghasil timah, Kepulauan Bangka Belitung memiliki cadangan mineral ikutan yang sangat besar dan diincar banyak negara asing. Pada umumnya, mineral ikutan tersebut berasosiasi dengan mineral lain atau sebagai mineral ikutan dalam mineral bijih atau konsentrat pada industri pertambangan bijih timah. Mineral-mineral ikutan dalam bijih timah mengandung unsur/logam bernilai ekonomi tinggi yang belum dimasukkan sebagai logam yang diperhitungkan dan dibuang sebagai tailing (bijih atau terak peleburan) atau ikut dalam konsentrat bijih. Mineral ikutan yang teridentifikasi dari penambangan timah antara lain: Ilmenit, Monazit, Xenotime, Zirkon, Rare earth elements, dll.

Dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan Permen ESDM Nomor 1 tahun 2014 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral. Pada bab II tata cara peningkatan nilai tambah mineral, dijelaskan komoditas tambang yang merupakan produk sampingan pengolahan tambang mineral logam diantaranya zirkon, ilmenit, monazit. Potensi besar dari Logam Tanah Jarang akan sangat menguntungkan jika Indonesia turut serta untuk mengembangkannya. Karena selama ini mineral penghasil Logam Tanah Jarang seperti monasit, rutile, xenotime sebagai mineral ikutan dari pengolahan bijih timah belum diusahakan.

Logam Tanah Jarang meliputi 17 unsur kimia, yakni scandium (Sc), ittrium (Y), lanthanum (La), cerium (Ce), praseodymium (Pr), neodimium (Nd), promethium (Pm), samarium (Sm), europium (Eu), gadolinium (Gd), terbium (Tb), disprosium (Dy), holmium (Ho), erbium (Er), thulium (Tm), itterbium (Yb), dan lutetium (Lu). Bahan-bahan turunan tersebut antara lain digunakan untuk industri televisi, kendaraan listrik hingga peralatan medis. Sejumlah negara seperti Amerika dan Rusia telah memulai industri pengolahan Logam Tanah Jarang dengan pasar terbesar dikuasai China.

Logam Tanah Jarang merupakan mineral langka yang cukup diminati negara asing sebagai bahan baku untuk peralatan vital militer seperti alat pelacak dan peralatan perang lainnya. Berdasarkan hasil survei badan geologi, potensi Logam Tanah Jarang (LTJ) terbesar di Bangka Belitung yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Mineral monasit menjadi salah satu sumber unsur tanah jarang yang terpenting. Kegunaan monasit dibutuhkan pada bidang industri untuk kapasitor, katoda, elektroda dan industri elektronik.

Mineral ikutan timah terdapat di wilayah daratan maupun perairan/lautan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun potensi yang ada dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 47 Sumberdaya Hipotesis Mineral Ikutan Timah (MIT) di Perairan WIUP Timah

Monasit	Wilayah IUP	Volume(m3)	Asumsi Grade (Kg/m3)	Tonage (ton)
	Bangka Ofshore	471.087.689	0,01	4.711
	Belitung Ofshore	23.995.820	0,01	240
	Kundur Ofshore	854.574.777	0,01	8.546
<b>Total Sumberdaya Hipotesis Monasit di Laut</b>				<b>13.497</b>

Xenotime	Wilayah IUP	Volume(m3)	Asumsi Grade (Kg/m3)	Tonage (ton)
	Bangka Ofshore	17.395.231	0,007	122
	Belitung Ofshore	2.896.641	0,007	20
	Kundur Ofshore		0,007	-
<b>Total Sumberdaya Hipotesis Xenotime di Laut</b>				<b>142</b>

Ilmenite	Wilayah IUP	Volume(m3)	Asumsi Grade (Kg/m3)	Tonage (ton)
	Bangka Ofshore	858.694.495	0,259	222.402
	Belitung Ofshore	130.959.834	0,259	33.919
	Kundur Ofshore	1.240.518.041	0,259	321.294
<b>Total Sumberdaya Hipotesis Ilmenite di Laut</b>				<b>577.615</b>

\*) Asumsi Grade menggunakan data rata-rata pemboran MIT di Bangka tahun 1999

\*\*) Volume dihitung dari data bor komposit 2003-2009

Tabel 48 Sumberdaya Hipotesis Mineral Ikutan Timah (MIT) di Daratan WIUP Timah

Monasit	Wilayah IUP	Volume(m3)	Asumsi Grade (Kg/m3)	Tonage(ton)
	Bangka Darat	17.587.279	0,01	176
	Belitung Darat	32.100.892	0,01	321
<b>Total Sumberdaya Hipotesis Monasit di Darat</b>				<b>497</b>

Xenotime	Wilayah IUP	Volume (m3)	Asumsi Grade (Kg/m3)	Tonage (ton)
	Bangka Darat	1.756.177	0,007	12
	Belitung Darat	1.117.898	0,007	8
<b>Total Sumberdaya Hipotesis Xenotime di Darat</b>				<b>20</b>

Ilmenite	Wilayah IUP	Volume(m3)	Asumsi Grade (Kg/m3)	Tonage(ton)
	Bangka Darat	19.737.637	0,259	5.112

	Belitung Darat	14.143.792	0,259	3.663
	<b>Total Sumberdaya Hipotesis Ilmenite di Darat</b>			<b>8.775</b>

*\*) Asumsi Grade menggunakan data rata-rata pemboran MIT di Bangka tahun 1999*

*\*\*) Volume dihitung dari data bor komposit 2003-2009*

Selama ini dalam proses penambangan timah di kepulauan Bangka Belitung, keberadaan mineral ikutan timah seringkali terabaikan, namun dunia industri berkembang dan mineral ikutan terbukti sangat dibutuhkan. Oleh karenanya saat ini mineral ikutan timah menjadi sangat bernilai. Di negara-negara seperti Jepang dan China saat ini sedang trend pengembangan teknologi hybrid seperti kendaraan ramah lingkungan dimana teknologi ini memiliki keunggulan efisiensi pada pembakaran. Pengembangan teknologi hybrid ini salah satunya membutuhkan mineral ikutan. Jepang selama ini didukung mineral ikutan dari China sebagai penghasil timah terbesar dunia, namun saat ini China giat menekuni industri sendiri (Home Industri) sehingga menggunakan hasil sumber daya alamnya untuk produksi sendiri. Hal ini merupakan peluang bagi mineral ikutan dari kepulauan Bangka Belitung untuk memenuhi kebutuhan industri Jepang dan negara lain yang selama ini bergantung pada pasokan dari China.

Pengembangan industri pengolahan mineral ikutan yang menjadi bahan baku industri memerlukan teknologi berinvestasi besar, karena memang secara teknis tidak mudah memisahkan mineral ikutan yang bentuknya lebih halus. Untuk bisa memisahkan mineral ikutan dan mengolahnya menjadi bahan baku industri yang bernilai ekonomis dibutuhkan teknologi tinggi. Dalam hal ini hilirisasi timah dan Logam Tanah Jarang berpotensi memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung. Oleh karena pemanfaatan tanah jarang tidak hanya menjadi sarana yang vital untuk digunakan pada berbagai macam produk industri, tetapi juga pada gilirannya akan bermuara pada penguasaan dan pengembangan teknologi serta meningkatkan kualitas industri metalurgi di Bangka Belitung khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan Logam Tanah Jarang berpotensi besar dalam memicu berkembangnya material baru yang dengannya itu memberikan sumbangan terhadap perkembangan teknologi yang cukup signifikan dalam ilmu material. Perkembangan material ini banyak diaplikasikan di dalam industri untuk meningkatkan kualitas produk industri. Contoh perkembangan yang terjadi pada magnet. Logam Tanah Jarang mampu menghasilkan neomagnet, yaitu magnet yang memiliki medan magnet yang lebih baik daripada magnet biasa. Sehingga memungkinkan munculnya teknologi pembuatan dinamo yang lebih kuat sehingga mampu menggerakkan mobil. Dengan adanya Logam Tanah Jarang, memungkinkan munculnya mobil bertenaga listrik yang dapat digunakan untuk perjalanan jauh.

Dalam aplikasi metalurgi, penambahan Logam Tanah Jarang digunakan dalam pembuatan baja high strength, low alloy, baja karbon tinggi, superalloy, stainless steel. Karena Logam Tanah Jarang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan material berupa kekuatan, kekerasan dan peningkatan ketahanan terhadap panas. Contohnya pada penambahan Logam Tanah Jarang dalam bentuk additif atau alloy pada paduan magnesium dan aluminium, maka kekuatan dan kekerasan paduan tersebut akan meningkat dengan signifikan.

Pemanfaatan Logam Tanah Jarang yang lain berupa pelat armor, korek gas otomatis, lampu keamanan di pertambangan, perhiasan, cat, lem, detektor nuklir, dan pengkounter, rod kontrol nuklir.

Logam Tanah Jarang merupakan mineral langka yang sangat penting dalam kebutuhan material produksi modern. Oleh karena Logam Tanah Jarang tidak dapat diperbarui. Di samping itu Logam Tanah Jarang tidak ditemukan di bumi sebagai unsur bebas melainkan dalam bentuk senyawa kompleks karbonat atau fosfat, seperti monazite, xenotime, dan zircon yang mengandung unsure radioaktif uranium dan torium.

Pemanfaatan Logam Tanah Jarang dapat mengantarkan Indonesia mewujudkan kemampuan dalam penguasaan dan pengembangan teknologi. Terutama teknologi elektronik yang selama berpuluh-puluh tahun masuk dan berkembang industri-industri elektronik asing di Indonesia, namun tidak menghasilkan transformasi teknologi elektronik yang signifikan. Selain itu pemanfaatan timah dan Logam Tanah Jarang nantinya akan mampu meningkatkan kualitas industri metalurgi di Indonesia dengan dihasilkannya spesifikasi baja dan logam paduan baru dengan kualitas yang lebih baik. Tentunya masih banyak lagi manfaat besar yang dapat diperoleh Indonesia dari pengolahan Logam Tanah Jarang ini yang mampu meningkatkan perkembangan teknologi di Indonesia.

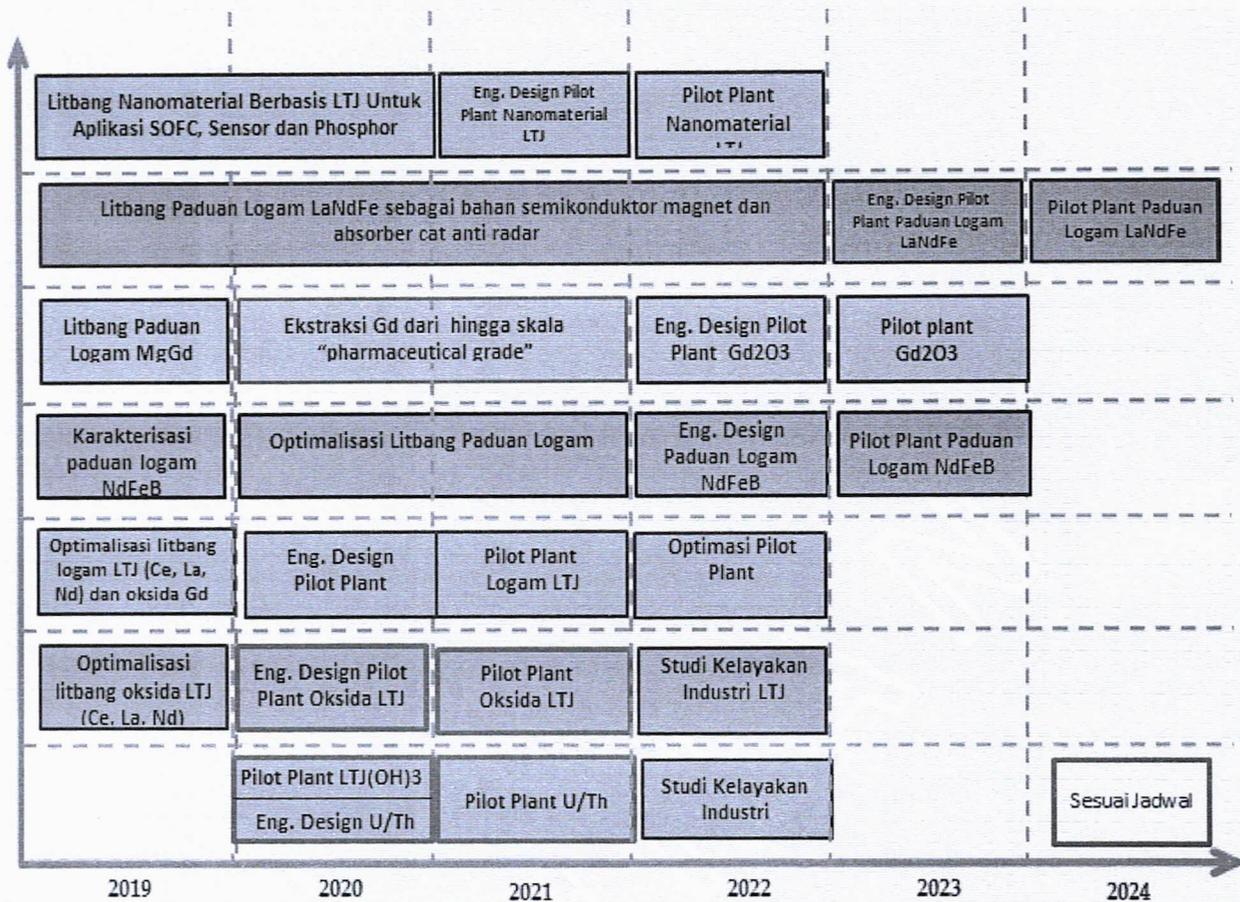
Untuk menjamin kepastian dalam proses pemanfaatan Logam Tanah Jarang maka diperlukan bantuan dan dukungan pemerintah. Terutama terkait dengan penetapan regulasi yang mendukung pengolahan mineral Logam Tanah Jarang seperti pembuatan sarana dan prasarana, perlindungan pemasaran sebagai inkubator awal industri nasional, dan yang utama bantuan permodalan untuk pendirian industri ini. Mengingat pendirian industri pertambangan yang kompetitif, memerlukan permodalan yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk membeli peralatan berefisiensi tinggi sehingga menurunkan biaya (cost) produksi sehingga memiliki harga jual yang kompetitif.

Secara umum dapat disimpulkan pentingnya pengembangan industri pengolahan Logam Tanah Jarang adalah karena industri tersebut memiliki potensi dan manfaat strategis, diantaranya:

- a. Meningkatkan nilai tambah ekonomi Monasit & Slag II yang sebelumnya merupakan produk samping pertambangan timah
- b. Industri pengolahan Logam Tanah Jarang akan membuka lapangan kerja baru serta mendorong berkembangnya industri maju baik di provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun di tingkat nasional
- c. Beroperasinya industri pengolahan Logam Tanah Jarang sangat potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah dan nasional
- d. Dengan terekstraknya Uranium dan Thorium dari Logam Tanah Jarang, potensi cadangan energi nasional dapat dikelola dengan baik
- e. Melindungi masyarakat dari potensi bahaya radiasi di sekitar lokasi pertambangan timah

Karena industri pengolahan timah dan mineral ikutan timah pada dasarnya masih merupakan potensi, oleh karena itu proses industrialisasi masih memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan pengkajian dan uji coba dalam skala yang terbatas. Hal ini juga mempertimbangan kesiapan dan ketersediaan dana, mengingat industri ini merupakan industri yang membutuhkan teknologi tinggi yang membutuhkan investasi yang mahal. Disamping itu pengkajian dari aspek lingkungan juga merupakan hal prioritas yang perlu dilakukan sebelum industri ini dikembangkan.

Secara garis besar, roadmap atau peta jalan pengembangan industri mineral ikutan timah, khususnya industrialisasi Logam Tanah Jarang dapat digambarkan sebagai berikut.



Adaptasi dari: dalam Focused Group Discussion Konsorsium Pengembangan Industri Berbasis LTJ (2016)

Gambar 11 Roadmap Industrialisasi Logam Tanah Jarang

Tabel 49 Program Pengembangan Industri Pengolahan Timah dan Mineral Ikutan Tahun 2019 – 2039

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
<b>I. Program Pengembangan SDM</b>								
1	Workshop/short course, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri tentang teknologi pengolahan timah dan bahan mineral ikutan timah	Disperindag, Dinas pertambangan	Industri timah		√	√	√	√
2	Pendidikan industri pengolahan timah dan mineral ikutan bagi aparat daerah/ Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri pengolahan timah dan mineral ikutan	Disperindag, Dinas pertambangan	Industri timah		√	√		
3	Pendirian lembaga pendidikan setingkat SMK dan Diploma dibidang pengolahan timah dan mineral ikutan tambang				√	√		
<b>II. Program Produksi dan Operasional Pengolahan Mineral Ikutan</b>								
<b>A. Persiapan Industri</b>								
1	Inventarisasi Potensi Logam Tanah Jarang di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Disperindag, Dinas pertambangan	Perusahaan pemilik IUP	Bappeda, BPS	√			

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
2	Penyusunan studi kelayakan industri pengolahan Logam Tanah Jarang	Disperindag, Dinas pertambangan	Perusahaan pemilik IUP	Bappeda	√			
3	Penelitian dan pengembangan terkait dengan pengolahan dan pemurnian Logam Tanah Jarang	Disperindag, Dinas pertambangan	Perusahaan pemilik IUP	Universitas & Lembaga penelitian	√	√	√	√
4	Pembangunan Pilot Plant industri pengolahan Logam Tanah Jarang	Disperindag, Dinas pertambangan	Industri Timah		√			
5	Penyusunan studi kelayakan pembangunan pabrik bahan bakar nuklir dari uranium						√	
6	Pembangunan Pilot Plant pabrik bahan bakar nuklir dari uranium							√
<b>B Pengembangan industri</b>								
1	Melakukan peninjauan mitra kerjasama (BUMN/Swasta) dalam memfasilitasi pembangunan industri berbasis timah dan Logam Tanah Jarang	Disperindag, Dinas pertambangan			√	√		
2	Fasilitasi pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) timah dan Logam Tanah Jarang	Disperindag, Dinas pertambangan			√	√		
3	Mengusulkan Penyertaan Modal Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan industri hilirisasi timah dan berbasis Logam Tanah Jarang				√	√	√	√
4	Pembuatan Pabrik Tin solder dan produk hilir timah lainnya				√	√		
5	Pembuatan Logam dan paduan logam berbasis Logam Tanah Jarang				√			
6	Menyediakan konsentrat mineral pembawa Logam Tanah Jarang sebagai bahan baku industri berbasis Logam Tanah Jarang				√	√	√	
<b>III. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri</b>								
1	Aplikasi LTJ di bidang material maju berbasis oksida LTJ					√		
2	Aplikasi LTJ dalam bidang kesehatan berbasis oksida LTJ	Disperindag				√	√	√
3	Pembuatan nanomaterial berbasis oksida LTJ sebagai bahan baku industri;	Disperindag				√	√	
4	Pembuatan tin solder dan produk hilir timah lainnya sebagai bahan baku industri;	Disperindag			√	√		
5	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan	Disperindag			√	√	√	√
6	Peningkatan Technology Readiness Levels (TRL)				√			
<b>IV. Program Pemasaran dan Perdagangan</b>								
1	Menyusun kajian dan analisa				√			

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
	pasar produk hilirisasi timah dan produk berbasis LTJ							
2	Peningkatan intensitas informasi pasar melalui media	Disperindag, Diskominfo			√	√		
3	Promosi pasar untuk ekspor melalui Badan Pengembangan Ekspor	Disperindag,			√	√	√	√
<b>V. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan</b>								
1	Fasilitasi dan promosi dan insentif investasi (khususnya untuk industri hilirisasi timah dan industri hulu pemisahan Logam Tanah Jarang)	DPMPTSP, Disperindag	Industri Timah, Investor		√	√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/bank	Disperindag	Industri Timah, Perbankan/lembaga keuangan		√	√	√	√
<b>VI. Program-program Pendukung Lainnya</b>								
1	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah; Kerjasama riset dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan timah dan Mineral ikutan timah)	BAPPEDA, Disperindag	Industri Timah, IKM	Penyedia dana riset	√	√	√	
2	Program Pengembangan Perwilayahan Industri	BAPPEDA, Dinas PU, Disperindag	Industri Timah, investor		√			
3	Program Pemberdayaan IKM	Disperindag	IKM		√	√	√	
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah				√			
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah				√			
6	Sosialisasi kepada Pemilik IUP Pengolahan dan Pemurnian Pasir Zirkon				√			

#### 4.2.2. Pembangunan Perwilayahan Industri

Sebagaimana tertuang dalam RIPIN, Provinsi Bangka Belitung tergabung dalam satu Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Sumatera Bagian Selatan bersama dengan Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung.

Meskipun Provinsi Bangka Belitung tidak menjadi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dalam RIPIN, namun perlu memberikan daya dukung pada WPI Sumatera Bagian Selatan. Dalam konteks Industri Prioritas Nasional, industri yang sesuai di Bangka Belitung antara lain adalah (1) industri pangan dan (2) industri hulu agro (3) industri logam dan bahan galian non logam.

## **a. Pembangunan Kawasan Industri (KI)**

Dalam pengembangannya masing-masing Kawasan Industri masih perlu banyak dukungan kebijakan pemerintah terutama terkait dengan ketersediaan infrastruktur seperti sarana dan prasarana basis KI, tersedianya energi listrik, air bersih, pelabuhan, energi, dan transportasi.

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) seperti yang disajikan pada Tabel 11 terdapat 7 (tujuh) KPI. Total luas kawasannya sekitar 15.158 Ha yang tersebar di 7 kota/kabupaten. Ketujuh peruntukan kawasan tersebut adalah : (1) Ketapang Kota Pangkalpinang (2) Tanjung Ular dan Tanjung Kelian di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, (3) Sungailiat di Kabupaten Bangka, (4) Sadai di Kabupaten Bangka Selatan, (5) Suge di Kabupaten Belitung, (6) Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur, dan (7) Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.

### **1. Kawasan Peruntukan Industri Ketapang, Kota Pangkal Pinang**

Dalam Perda Kota Pangkalpinang Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang tahun 2011-2030, disebutkan bahwa Kawasan Peruntukan Industri (KPI) untuk Kota Pangkalpinang akan dikembangkan di KPI Pangkalpinang melalui kerjasama dengan BUMD dan atau swasta. KPI Ketapang dikembangkan di Kecamatan Bukit Intan.

Kegiatan industri yang masih berada di luar KPI akan direlokasi secara bertahap ke dalam KPI Ketapang. Industri rumah tangga diperbolehkan di luar KPI dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keserasian kawasan. Jenis industri yang akan dikembangkan di KPI Ketapang terdiri atas industri besar, sedang dan industri kecil.

Sedangkan dalam Perda Kota Pangkalpinang Nomor 06 tahun 2005 tentang *Site Plan* Kawasan Industri (KI) Ketapang dijelaskan bahwa KI Ketapang terletak di Kecamatan Bukit Intan tepatnya di Kelurahan Bacang dan Air Itam, seluas 422 Ha dan lahan cadangan untuk pengembangan seluas 481,69 Ha. Konsep penempatan ruang meliputi blok-blok kawasan industri yaitu untuk jenis industri kecil, sedang dan besar (campuran).

Komponen-komponen ruang yang akan dialokasikan pada KI Ketapang antara lain meliputi:

- 1) Industri kecil (industri bahan bangunan, industri kerajinan, industri makanan khas bangka);
- 2) Industri sedang (industri keramik, industri cinderamata);
- 3) Industri besar (industri maritim, agro industri, industri perakitan dan permesinan, serta industri pengolahan timah);

### **2. Kawasan Industri Tanjung Ular dan Tanjung Kelian, Kabupaten Bangka Barat**

Dalam Perda Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Barat tahun 2014-2034, disebutkan bahwa kawasan peruntukan industri (KPI) untuk Kabupaten Bangka Barat terdiri atas : (1) kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) di Tanjung Ular seluas kurang lebih 1.275 hektar, dan (2) kawasan industri di sekitar Tanjung Kalian seluas  $\pm$  139 ha.

KIPT Tanjung Ular ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari sudut kepentingan ekonomi.

### **3. Kawasan Perkotaan Sungailiat, Kabupaten Bangka**

Dalam perda Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun

2014-2034 dijelaskan bahwa blok peruntukan industri ada di Kelurahan Jelitik. Zona industri yang dikembangkan meliputi:

- a. Subzona industri kimia dasar; seluas kurang lebih 47 Ha
- b. Subzona industri mesin dan logam dasar; seluas kurang lebih 98 Ha
- c. Subzona industri kecil; seluas kurang lebih 61 Ha
- d. Subzona aneka industri; seluas kurang lebih 47 Ha

#### **4. Kawasan Industri Sadai, Kabupaten Bangka Selatan**

Dalam Perda Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2014-2034, disebutkan bahwa Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Bangka Selatan meliputi kawasan industri (KI) dan industri rumah tangga. Kawasan industri adalah KI Sadai dengan luas kurang lebih 3.086 hektar. Sedangkan kegiatan industri rumah tangga dikembangkan diseluruh wilayah kecamatan Kabupaten Bangka Selatan.

KI Sadai termasuk dalam wilayah Kawasan Strategis Provinsi yaitu kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Kawasan Industri Terpadu Pelabuhan (KITP) Tukak Sadai. Keduanya merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

#### **5. Kawasan Industri Suge, Kabupaten Belitung**

Dalam Perda Kabupaten Belitung Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung tahun 2014-2034, disebutkan bahwa kawasan peruntukan industri (KPI) untuk Kabupaten Belitung meliputi : (a) kawasan industri, (b) area industri berbasis produksi, (c) pengembangan industri dan menengah; dan (d) pengembangan industri rumah tangga. Kawasan industri tersebut dengan luas  $\pm$  1.414 Ha terletak di Desa Sungai Samak, Desa Pegantungan Kecamatan Badau, dan Desa Bantan Kecamatan Membalong. Sedangkan area lainnya tersebar di seluruh kecamatan.

Dalam Perda juga disebutkan terkait penetapan Kawasan Industri (KI) Suge dan kawasan pelabuhan regional Tanjung Batu sebagai kawasan pengembangan ekonomi secara khusus. KI Tanjung Batu Suge merupakan Kawasan Ekonomi Khusus Suge (KEK Suge), meliputi pelabuhan laut regional Tanjung Batu dan kawasan industri Suge sebagai simpul transportasi barang dan orang skala nasional serta kegiatan industri yang berpotensi sebagai penghela ekonomi wilayah provinsi.

#### **6. Kawasan Industri Air Kelik, Kabupaten Belitung Timur**

Dalam Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Timur tahun 2014-2034, disebutkan bahwa kawasan peruntukan industri (KPI) untuk Kabupaten Belitung Timur meliputi : (a) kawasan peruntukan industri besar, (b) kawasan peruntukan industri menengah, dan (c) kawasan peruntukan industri rumah tangga.

Kawasan peruntukan industri besar yaitu Kawasan Industri Air Kelik (KIAK) terdapat di Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Damar dengan luas kurang lebih 1.532 ha. Sedangkan kawasan peruntukan industri menengah dan rumah tangga tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.

KIAK merupakan kawasan strategis provinsi berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi bersama-sama dengan Pelabuhan ASDP Manggar-Ketapang, Kawasan Industri Perikanan Manggar, dan Kawasan Kota Terpadu Mandiri.

Potensi investasi/industri di KIAK adalah : (1) pengolahan hasil laut, (2) makanan, (3) pengolahan kelapa sawit, (4) pengolahan lada, (5) pengolahan karet, (6) pengolahan kelapa, dan (7) industri kimia.

## 7. Kawasan Industri Tanjung Berikat Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah

Dalam Perda Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2011-2031, disebutkan bahwa Kawasan Industri (KI) Tanjung Berikat merupakan kawasan strategis provinsi berdasarkan aspek pertumbuhan ekonomi. KI Tanjung Berikat ada di wilayah kecamatan Lubuk Besar yang merupakan kawasan agropolitan. KI Tanjung Berikat diperuntukkan sebagai kawasan industri besar seluas kurang lebih 7.019 ha. Untuk kawasan industri sedang terdapat di Desa Tanjung Gunung-Desa Kayu Besi seluas kurang lebih 287 hektar dan Desa Tanjung Pura seluas kurang lebih 5 (lima) ha.

### b. Pengembangan Sentra IKM

Selain industri besar dan menengah yang difasilitasi pengembangannya melalui KI, pembangunan industri daerah harus memperhatikan IKM daerah. Oleh karena itu harus ada program yang terkait dengan fasilitasi pengembangan IKM melalui sentra-sentra IKM dimaksud.

Pengembangan sentra IKM perlu didukung tersedianya sarana dan prasarana sentra. Pemerintah juga harus memberikan insentif khusus agar IKM dapat tumbuh dan sentra juga berkembang. Pada setiap Kabupaten/Kota diharapkan minimal dapat dibangun 1 (satu) Sentra Baru IKM (*by design*). Selain itu, penataan kembali pusat/area kegiatan IKM yang sudah ada perlu dilakukan sebagai sebuah Sentra pada setiap Kabupaten/Kota.

Program-program prioritas pengembangan perwilayahan industri di Bangka Belitung yang perlu dimasukkan dalam rencana pengembangan perwilayahan industri.

Tabel 50 Program prioritas pengembangan perwilayahan industri di Bangka Belitung

No	Program	Tahun		
		2019-2024	2024-2029	2029-2039
<b>B</b>	<b>Pengembangan KPI</b>			
	1. Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan KPI masing-masing kabupaten/ kota termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	√	√	√
	2. Penyiapan instrument legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	√		
	3. Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan	√	√	√
<b>C</b>	<b>Pembangunan KI</b>			
	1. Pengkajian mendalam konsep untuk pemprioritasan KI di Bangka Belitung (khususnya prioritas untuk mendukung pembangunan industri komoditas unggulan,	√		
	2. Percepatan penuntasan permasalahan dan konsep pengembangan KI prioritas serta kelengkapan administrative dan regulasinya	√		
	3. Percepatan penuntasan permasalahan dan pembebasan lahan utama KI prioritas	√		
	4. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana KI prioritas, termasuk diantaranya penyiapan dan realisasi penyediaan jaringan jalan, energy listrik dan air bersih, serta	√		

No	Program	Tahun		
		2019-2024	2024-2029	2029-2039
	jaringan komunikasi			
5.	Insentif khusus untuk industri yang masuk dalam KI	√	√	
6.	Pengembangan berkelanjutan untuk KI dan kawasan lainnya	√	√	
<b>D</b>	<b>Pengembangan Sentra IKM</b>			
1.	Identifikasi sentra potensial dan penyusunan konsep dan perencanaan pengembangannya	√		
2.	Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk diantaranya workshop/ pusat promosi	√	√	
3.	Insentif khusus untuk IKM dalam sentra	√	√	

### c. Wilayah Pengembangan Industri Unggulan

Setelah ditetapkan komoditas industri unggulan, selanjutnya ditentukan wilayah yang akan menjadi pusat pengembangannya. Penetapan pusat pengembangan dengan memperhatikan beberapa faktor antara lain : 1) ketersediaan bahan baku (kuantitas dan kontinuitas), 2) kemudahan akses bahan baku, 3) sudah ada industri menengah/besar yang dikembangkan, 4) mempunyai potensi untuk dikembangkan industri besar, 5) dukungan infrastruktur yang memadai, 6) dukungan energi yang memadai, dan 7) peluang akses pembiayaan. Berdasarkan pertimbangan terhadap faktor-faktor tersebut, berikut rencana wilayah pengembangan industri unggulan.

Tabel 51 Rencana wilayah pengembangan industri unggulan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Komoditas Industri Unggulan Propinsi	Rencana Wilayah Pengembangan
1.	Pengolahan Ikan dan hasil laut	Pangkal Pinang, Belitung, Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat
2.	Pengolahan Lada	Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Belitung
3.	Hilirisasi Timah dan Mineral ikutan	Bangka Barat, Belitung, Bangka Tengah, Bangka, Pangkalpinang
4.	Pengolahan Kelapa Sawit	Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka

### 4.2.3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumberdaya industri yang relevan diperlukan untuk memberikan daya dukung yang memadai bagi pertumbuhan industri daerah. Sumberdaya disinibukan hanya kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya permodalan, teknologi, dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sumberdaya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

#### a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Industri yang kuat memerlukan sumberdaya manusia dengan kualifikasi dan kompetensi yang relevan dalam jumlah memadai. Dengan demikian harus ada

program-program yang disusun untuk bisa memastikan tersedianya sumberdaya manusia industri dimaksud (Tabel 52).

Tabel 52 Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun			
		2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
1.	Peningkatan kemampuan SDM petani khususnya lada dan sawit				
	b. Training/ diklat intensifikasi perkebunan	√			
	c. <i>Workshop/ short course</i> standar pasca panen	√			
2.	Fasilitasi peningkatan kemampuan SDM industri				
	a. <i>Workshop/ short course</i> QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	√	√		
	b. Pendidikan industri khususnya untuk industri hasil laut dan perikanan, lada, sawit, dan mineral ikutan bagi aparat daerah/ Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	√			
3.	Pengembangan balai/ sentral pelatihan industri/ lembaga pendidikan komoditas dan industri unggulan		√		
4.	Membangun/mendirikan sekolah kejuruan/Diploma khusus komoditas/industri hasil laut dan perikanan, lada, sawit, dan olahan timah dan mineral ikutan	√	√		

Pada periode 2019-2024 program 1, yakni peningkatan kapasitas petani dilaksanakan untuk minimum 30 % dari petani aktif, sedangkan untuk program 2a dilaksanakan untuk wakil dari 90 % unit industri besar dan 50 % IKM. Melalui program 2b diharapkan ada sedikitnya masing-masing 1 orang ahli industri hasil laut dan perikanan, lada, sawit, dan mineral ikutan pada setiap institusi kabupaten/kota yang relevan, dan sedikitnya 2 orang di tingkat provinsi untuk industri masing-masing komoditas.

#### b. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumberdaya Alam

Sumberdaya alam merupakan basis pengembangan industri dalam RPIP ini, sehingga berbagai hal terkait dengan pemanfaatannya, penyediaannya dan penyaluran sumberdaya alam ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan industri dan pencapaian sasaran-sasaran yang telah dirumuskan dalam RPIP ini. Sebagai provinsi dengan luasan wilayah yang sangat besar, Provinsi Bangka Belitung memiliki berbagai sumberdaya alam yang besar dan sangat potensial dikembangkan industrinya.

Potensi sumberdaya yang sangat potensial dikembangkan adalah sub-sektor perkebunan, perikanan dengan komoditas utamanya yaitu lada, sawit, dan hasil laut/ perikanan. Selain itu adanya mineral ikutan dari hasil pertambangan yang juga dapat bernilai jual tinggi jika diolah lebih lanjut. Maka terhadap komoditas utama tersebut di atas haruslah dapat dimanfaatkan secara optimal, disediakan dan disalurkan secara pasti dan kontinyu, baik kuantitas maupun kualitas untuk tumbuh dan berkembangnya industri daerah. Oleh karena itu harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan tersedianya sumberdaya alam tersebut.

Tabel 53 Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun			
		2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
1.	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), peremajaan yang berwawasan lingkungan, khususnya lada, sawit, hasil laut dan perikanan, timah dan mineral ikutan				
	a. Program intensifikasi dan peremajaan perkebunan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	√	√		
	b. Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	√			
	c. Pengendalian hama dan penyakit tanaman	√	√	√	√
2.	Peningkatan jalan usaha tani (ke sumber-sumber bahan baku industri)	√	√		
3.	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri				
	a. Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	√	√	√	
	b. Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	√			
	c. Monitoring hasil dan standarisasi	√	√	√	√

Pada periode 2019-2024 program 1a ditargetkan untuk semua petani aktif potensial, sedangkan 1b untuk sedikitnya hingga 10 % dari petani aktif dan potensial. Program 1c sepenuhnya harus menjadi tanggung jawab SKPD terkait, berkoordinasi secara intensif dengan lembaga nasional pengendali hama dan penyakit tanaman. Untuk program 2, setidaknya seluruh perkebunan potensial terhubung oleh jalan usaha tani. Seperti halnya program 1a dan 1b, maka program 3a ditargetkan untuk semua petani aktif potensial, sedangkan 3b untuk sedikitnya hingga 10 % dari petani aktif dan potensial. Program 3c sepenuhnya harus menjadi tanggung jawab SKPD terkait, berkoordinasi secara intensif dengan pelaku usaha industri dan lembaga riset pasca panen.

### c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pembangunan industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dimaksud (Tabel 54).

Tabel 54 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri 2019-2039

No	Program	Tahun			
		2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
1	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevan) pada	√	√	√	√

No	Program	Tahun			
		2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
	industri pengolahan				
2	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk <i>home industri</i> )	√	√		
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan (seperti dengan Balitri Puslitbun, Batan, BPPT, IPB dll.)	√	√	√	√

Dengan program 1 diharapkan seluruh industri IBS sudah menerapkan setidaknya SNI secara konsisten. Program 2 khusus untuk IKM dan home industri khususnya yang potensial. Sedangkan melalui program 3, SKPD terkait harus memfasilitasi terwujudnya kerjasama riset dan pengembangan industri maupun proses produksi yang dibutuhkan daerah.

#### d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Untuk meningkatkan daya saing dan agresifitas pasar dibutuhkan kreatifitas dan inovasi yang terus-menerus. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya kreatifitas dan inovasi industri dimaksud.

Tabel 55 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Tahun 2019-2039

No	Program	Tahun			
		2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
1	Pemanfaatan media informatika dan e-business secara profesional (termasuk informasi harga untuk petani, dll.)	√	√	√	√
2	Diseminasi teknologi tepat guna	√	√		
3	Pengembangan 'branded' produk Bangka Belitung	√	√	√	√

Melalui program pertama (1) diharapkan semua *stakeholders*/ petani/pelaku industri yang relevan termasuk IKM dapat memanfaatkan media informatika/internet dalam bisnis. Penggunaan internet akan menjadi sangat luas di masa datang. Pemerintah daerah harus mendorong agar penyediaan layanan media informatika/ internet yang dibutuhkan dapat terpenuhi secara baik. Sementara itu diseminasi teknologi tepat guna perlu dilakukan secara masif pada IKM dengan mendorong kreatifitas dan inovasi. Dengan kreatifitas dan inovasi ini akan diperoleh suatu produk dan proses produksi yang berdaya saing, maka dalam tataran ini pengembangan 'branded' produk dalam program 3 (tiga) menjadi langkah strategis untuk memunculkan kesan positif produk daerah dan daya saing produk. Namun, kreatifitas dan inovasi ini tidak boleh berhenti dikembangkan dan harus paling tidak untuk terus dipertahankan agar *brand* tersebut juga tetap terjaga.

#### e. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pembiayaan sering merupakan permasalahan yang menjadi kendala tumbuh-berkembangnya industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pembiayaan industri dimaksud tidak menjadi masalah (Tabel 56).

Tabel 56 Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun			
		2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
1	Fasilitasi dan insentif investasi	√	√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga financial/ bank dan Non Bank	√	√	√	√
3	Bimbingan/ training manajemen keuangan	√	√		

#### 4.2.4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan industri, perlu didukung juga oleh pembangunan sarana dan prasarana industri. Sarana dan prasarana industri perlu dibangun dan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan industri pengolahan yang telah disebutkan sebelumnya. Pembangunan sarana dan prasarana industri untuk 20 tahun ke depan meliputi pengelolaan lingkungan, lahan, jaringan kelistrikan, telekomunikasi, dan sumber daya air, jaringan sanitasi, dan jaringan transportasi, serta pengembangan fasilitas penunjang. Pembahasannya secara lebih detil dapat dilihat berikut ini.

##### a. Pengelolaan Lingkungan

Pengembangan industri pengolahan diharapkan tidak menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan. Oleh karena itu perlu dilakukan program-program terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut.

Tabel 57 Program Pengelolaan Lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039

No	Program	Tahun			
		2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
1.	Pengendalian pencemaran lingkungan	√	√	√	√
2.	Peningkatan pengelolaan limbah dan sampah industri	√	√	√	√
3.	Peningkatan pelayanan IPAL dan drainase	√	√	√	√
4.	Penghijauan wilayah industri	√	√	√	√
5.	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup	√	√	√	√

##### b. Lahan

Untuk merealisasikan rencana pembangunan provinsi yang berbasis industri, diperlukan lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi kawasan industri atau kawasan peruntukkan industri. Agar lahan untuk kawasan tersebut tidak menjadi

masalah dan menghambat dalam pengembangan industri, maka perlu ada program-program tertentu terkait dengan lahan peruntukkan industri.

Tabel 58 Program Penyediaan Lahan untuk Industri di Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019- 2039

No	Program	Tahun			
		2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
1.	Sosialisasi tentang lahan peruntukkan industri dan ketentuan-ketentuannya	√			
2.	Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana	√	√		
3.	Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan	√	√		
4.	Implementasi penggunaan lahan untuk kawasan industri	√	√	√	√

### c. Jaringan Kelistrikan, Telekomunikasi, dan Sumber Daya Air

Berdasarkan data energi listrik dan sumber daya air yang disajikan pada bab 2, terlihat bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki jaringan listrik dan air yang cukup baik. Namun demikian, untuk memastikan pasokan listrik dan air tetap cukup untuk industri pengolahan yang akan dikembangkan, perlu dilakukan program-program yang dapat memastikan hal tersebut.

Selain energi listrik dan sumber daya air, hal yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya jaringan telekomunikasi yang baik. Untuk memperlancar komunikasi dalam operasional industri, diperlukan media komunikasi tulisan (surat, surat kabar, majalah, dan lain-lain) dan juga media komunikasi yang bersifat audio-visual (radio, televisi, dan lain-lain). Selain itu, yang perlu ditingkatkan kapasitas layanannya adalah aspek telekomunikasi melalui media telepon (khususnya telepon seluler) dan internet. Saat ini akses terhadap internet sangat penting dalam kegiatan usaha, terlebih karena pemasaran untuk produk industri yang dihasilkan banyak menggunakan e-marketing. Dengan menggunakan internet, berbagai informasi yang menunjang proses produksi juga dapat diperoleh dengan mudah. Oleh karena itu perlu adanya program-program yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas jaringan internet tersebut.

Program-program yang dapat dilakukan untuk menjamin kelangsungan pembangunan industri di Kepulauan Bangka Belitung dalam hal energi listrik, sumber daya air, dan telekomunikasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 59 Program Peningkatan Energi Listrik, Sumber Daya Air, dan Telekomunikasi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 – 2039

No	Program	Tahun			
		2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
1	Peningkatan pelayanan kapasitas daya listrik dan jangkauan layanan	√	√	√	√
2	Peningkatan pelayanan air bersih (volume dan jangkauan layanan)	√	√	√	√
3	Peningkatan kapasitas pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/ seluler dan internet)	√	√	√	√

#### d. Jaringan Sanitasi

Dalam pembangunan berbasis industri, peningkatan dan perbaikan terhadap jaringan sanitasi juga perlu mendapatkan perhatian. Selain pengelolaan lingkungan yang baik, pengelolaan sanitasi yang baik juga dapat berpengaruh terhadap kesuksesan pengelolaan industri. Dengan sanitasi yang baik, lingkungan industri menjadi bersih dan sehat. Beberapa program untuk meningkatkan kualitas sanitasi di Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut.

Tabel 60 Program Pembangunan Infrastruktur/Sanitasi di Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039

No	Program	Tahun			
		2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
1	Peningkatan pelayanan sanitasi total berbasis masyarakat (akses terhadap air bersih, dll)	√	√	√	√
2	Peningkatan Program Peningkatan Percepatan Sanitasi (PPS)	√	√	√	√
3	Peningkatan akses jamban sehat	√	√	√	√
4	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya sanitasi yang baik dan dampaknya terhadap kesehatan	√	√	√	√

#### e. Jaringan Transportasi

Pengembangan sarana prasarana yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan berbasis pengolahan industri yaitu pembangunan jaringan transportasi. Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jenis transportasi yang menunjang pembangunan industri adalah meliputi transportasi darat, laut, dan udara, yaitu pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara.

Menurut data BPS (2017), masih terdapat jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kondisinya rusak dan rusak berat, yaitu masing-masing sepanjang 52,89 km dan 14,48 km. Tentu jalan yang rusak dan rusak berat tersebut akan mengganggu proses pembangunan industri yang direncanakan. Oleh karena itu perbaikan untuk jalan yang rusak dan rusak berat tersebut perlu mendapat prioritas. Selain itu perlu dilakukan percepatan pembangunan jalan-jalan baru yang menghubungkan antara lokasi industri dan sumber bahan baku.

Selain jalan, kondisi jembatan juga perlu dilakukan pemeliharaan secara rutin dan dilakukan perbaikan jika terindikasi terdapat kerusakan. Untuk pelabuhan, terdapat beberapa pelabuhan yang perlu dilakukan perluasan, yaitu Pelabuhan Tanjung Kalian dan Sadai. Selain itu dilakukan pengembangan Pelabuhan Tanjung Ular menjadi pelabuhan industri dan pengembangan Pelabuhan Samudra Belitung menjadi pelabuhan nasional, serta pemindahan Pelabuhan Pangkalbalam ke sekitar Pantai Pasirpadi. Untuk bandar udara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki dua bandara yang relatif masih baru, yaitu Bandara Depati Amir dan Bandara HAS Hanandjoeddin. Untuk kedua bandara tersebut juga perlu dilakukan pemeliharaan yang optimal dan peningkatan kualitas layanan dan fasilitasnya sehingga pemanfaatannya untuk keperluan industri menjadi maksimal.

Program-program pembangunan yang terkait dengan pengembangan jaringan transportasi di Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 61 Program Pembangunan Transportasi di Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039

No	Program	Tahun			
		2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
1	Perbaikan dan pemeliharaan kondisi jalan yang rusak dan rusak berat	√	√	√	√
2.	Percepatan Pembangunan Jalan-jalan Baru (Khususnya yang menghubungkan lokasi industri dengan sumber-sumber produksi bahan baku industri)	√	√		
2.	Perbaikan dan pemeliharaan Jembatan	√	√	√	√
3.	Perluasan Pelabuhan Tanjung Kalian dan Sadai	√	√		
4.	Pengembangan Pelabuhan Tanjung Ular menjadi pelabuhan industri	√	√		
5.	Pengembangan Pelabuhan Samudra Belitung menjadi pelabuhan nasional	√	√		
6.	Pemindahan Pelabuhan Pangkalbalam ke sekitar Pantai Pasirpadi	√			
7.	Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas bandara	√	√	√	√

#### f. Pengembangan Fasilitas Penunjang

Aspek pergudangan merupakan aspek penting lain yang perlu diprioritaskan pembangunan atau pengembangannya untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pembangunan berbasis industri. Untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai data bahan baku, proses produksi, pasar, dan lain-lain perlu dilakukan pembangunan sistem informasi industri. Layanan informasi industri yang telah ada juga perlu ditingkatkan kualitasnya dan selalu diperbaharui (di-update) kebaruan data dan sistemnya. Untuk menjamin kualitas produk yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global, perlu dibangun balai-balai penelitian termasuk laboratorium untuk pengujian produk. Pemenuhan kualitas produk sesuai dengan standarisasi industri yang berlaku dapat dicapai melalui kerjasama antar instansi maupun dengan pihak eksternal. Penjabaran program-program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 62 Program Pembangunan Fasilitas Penunjang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039

No	Program	Tahun			
		2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
1.	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas gudang	√	√	√	√
2.	Pembangunan Sistem Informasi Industri	√	√		
3.	Peningkatan Layanan Informasi Industri dan <i>Up-dating</i>	√	√	√	√
4.	Pembangunan Balai Besar termasuk Laboratorium Produk Hasil Industri	√	√		

No	Program	Tahun			
		2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
5.	Penentuan standarisasi industri dan kerjasama penerapan standarisasi industri	√	√		

#### 4.2.5. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)

Pengembangan industri di provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak boleh melupakan pemberdayaan IKM. Peran IKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup signifikan, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja dan distribusi kesejahteraan yang lebih merata ke tengah masyarakat. Meskipun kewenangan pembinaan Industri Kecil berada di Pemerintahan Kabupaten Kota, namun karena posisi IKM yang strategis dalam pengembangan ekonomi provinsi, maka provinsi juga perlu memberikan perhatian khusus pada pengembangan IKM ini.

Strategi pemberdayaan IKM di provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan agar IKM di Bangka Belitung mampu berperan dalam hal:

1. Pemanfaatan potensi bahan baku

Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumber bahan baku yang sangat potensial, baik yang berada di lautan maupun daratan. Pemanfaatan sumber daya tersebut akan efisien jika dilakukan pada skala ekonomi tertentu (umumnya skala menengah dan besar) yang seringkali memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan, sesuai dengan skala operasinya, IKM dapat berperan signifikan sebagai pionir dengan melakukan pengolahan yang memberikan nilai tambah pada bahan baku tersebut.

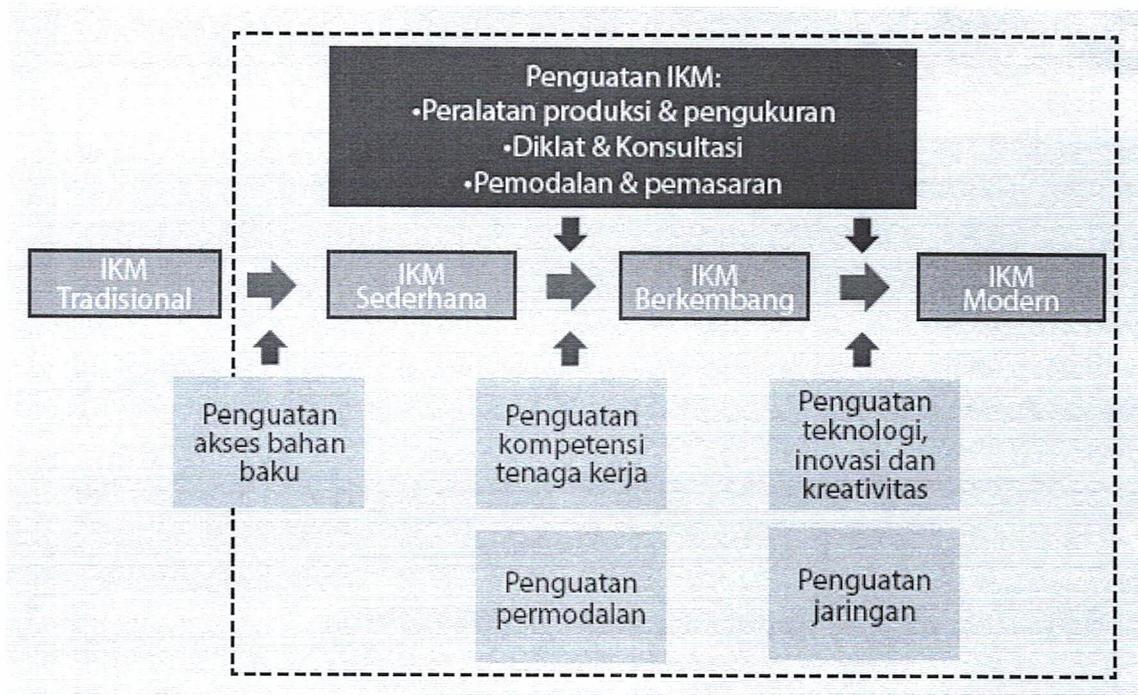
2. Penyerapan tenaga kerja

Dibalik keterbatasan IKM dalam permodalan, IKM memiliki potensi penyerapan tenaga kerja pada industri padat karya. Melalui dukungan sederhana pada sentra IKM, penyiapan operasi IKM baru dan pengembangan IKM yang ada dapat dilakukan relatif lebih mudah dibanding industri besar sehingga berpotensi membuka lapangan kerja yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Namun, upaya ini perlu diikutidengan peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara langsung, baik dalam aspek manajerial maupun aspek teknis, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing IKM.

3. Pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kreativitas

Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan, dari yang sederhana sampai yang canggih. Berbagai teknologi sederhana, terbukti mampu memberikan manfaat yang besar pada aplikasi di industri yang memiliki sumber daya (bahan baku, permodalan, dan tenaga kerja) yang terbatas namun memiliki tingkat inovasi dan kreativitas yang tinggi. Pemanfaatan teknologi yang disertai inovasi dan kreativitas sesuai dengan karakteristik IKM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dengan cara tersebut, IKM mampu menghasilkan produk dengan biaya yang relatif rendah namun dengan kualitas yang memadai sehingga dapat memperluas pasarnya.

Strategi pengembangan IKM tersebut perlu dilengkapi dengan upaya untuk mengatasi kelemahan IKM yaitu pada ketersediaan permodalan dan pengembangan jaringan kerjasama. Secara lengkap, strategi pengembangan IKM dilaksanakan melalui skema pengembangan sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Adopsi dari Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035

Gambar 12. Tahapan Pengembangan IKM

Berdasarkan strategi dan tahapan pengembangan IKM diatas, maka disusun program-program pemberdayaan IKM sebagaimana terlihat pada tabel 65. Meskipun begitu tetap harus diperhatikan bahwa kewenangan dalam hal pembinaan dan pemberdayaan IKM sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, bahwa kewenangan pembinaan terhadap industri besar dilakukan oleh Provinsi, sedangkan kewenangan pembinaan terhadap industri kecil dan menengah dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Sehingga program dan kegiatan pemberdayaan IKM wiyalah Kepulauan Bangka Belitung secara lebih rinci berada di Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Program-program pemberdayaan IKM secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 63 Program Pemberdayaan IKM

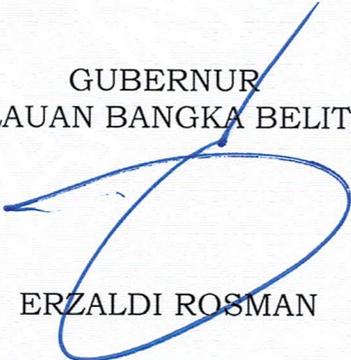
No	Program	Tahun			
		2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
1.	Pendataan IKM di provinsi Bangka Belitung (Updating) & pe-rating-an IKM untuk memudahkan pengembangan program pembinaan yang terfokus	√	√	√	√
2.	Fasilitasi pemodalan bagi IKM & pendirian lembaga penjamin pinjaman bagi IKM	√	√	√	√
3.	Peningkatan kapasitas manajerial pengusaha IKM	√	√		
4.	Fasilitasi alat tepat guna sesuai kebutuhan IKM	√	√	√	
5.	Pengembangan Sentra IKM Pengolahan Pangan	√	√	√	√
6.	Peningkatan kualitas produksi IKM olahan pangan dengan fasilitasi traning & standarisasi mutu	√	√	√	
7.	Peningkatan inovasi dan produksi produk-produk olahan pangan khas Bangka Belitung	√	√	√	√

No	Program	Tahun			
		2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039
8.	Peningkatan promosi IKM pengolahan pangan dengan penguatan pada Country of Origin	√	√	√	
9.	Pengembangan linkage dengan IBS (kerjasama produksi; IKM menjadi pemasok IBS)	√	√	√	

## 5. PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039 ini merupakan penjabaran lebih detail dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 khususnya terkait dengan pembangunan industri. RPIP ini mengacu pada RIPIN 2015-2035 dan RPIP Kepulauan Bangka Belitung ini menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) dan Rencana Strategik OPD Bidang Industri pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain sebagai dasar penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, RPIP ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN